



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI  
COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020**

**RISMA SURYANI PURWANTO**

**NIM: 120190301025**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA**

**BOGOR**

**2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Risma Suryani Purwanto  
NIM : 120190301025  
Program Studi : Manajemen Bencana  
Fakultas : Keamanan Nasional  
Judul Tesis : Strategi Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020

Pembimbing I,



Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., CIQaR  
Kolonel Cba/NRP. 33586

Pembimbing II,



Dr. Bambang Wahyudi, S.IP., M.Si.





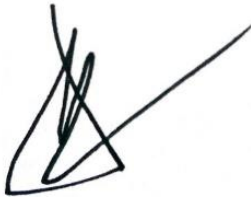
Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Keamanan Nasional



Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU  
Laksamana Muda TNI

Tanggal : 20 Januari 2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Risma Suryani Purwanto NIM : 120190301025 Program Studi : Manajemen Bencana Fakultas : Keamanan Nasional Judul Tesis : Strategi Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing 1  Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., CIQaR		9/2/21
2.	Pembimbing 2  Dr. Bambang Wahyudi, S.IP., M.Si.		9/2/21
3.	Penguji 1  Dr. IDK Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQaR		9/2/21
4.	Penguji 2  Dr. Drs. Yuli Subiakto, A.Pt., M.Si		9/2/21
5.	Penguji 3  Dr. Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep		9/2/21

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2021



Risma Suryani Purwanto

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pertahanan dengan judul, “Strategi Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor Tahun 2020”.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU, selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Bapak Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST., M.MT., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU, selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian;
3. Bapak Kolonel Kesehatan Dr. I. D. K. Kerta Widana, S.KM., M.KKK., CIQnR., CIQaR, selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bencana;
4. Bapak Kolonel Cba Dr. Yusuf Ali, S.E., M.M., CIQaR., selaku Dosen Pembimbing I; dan Bapak Dr. Bambang Wahyudi, S. IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para Informan yang telah memberikan dukungan berupa waktu dan data selama masa penelitian.
6. Keluarga saya, Ayah saya Purwanto, S.E.; Mama saya Suharti; Adik-Adik saya Rafi Satya Raharja dan Raya Destrya Inamori, juga Mba Atun untuk semua dukungan dan semangat yang diberikan.
7. Kamu, Cem. Terimakasih atas semua motivasi dan dukungannya selama pengerjaan tesis ini.
8. Mentor-mentor dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi S2 Manajemen Bencana Cohort 10 serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Pertahanan Cohort 11 atas dukungan yang diberikan.
9. Serta semua pihak yang telah memberikan pengarahan, memberikan pengetahuan dan meluangkan waktunya yang sangat berarti.

Dalam tesis ini, peneliti menyadari masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna sebagai pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dan juga peneliti.

Bogor, Februari 2021

Risma Suryani Purwanto

## ABSTRAK

### STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

RISMA SURYANI PURWANTO

Kebencanaan merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, baik bencana alam, non alam, maupun bencana sosial. Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 dinyatakan menjadi bencana nasional sebagai bencana non-alam yaitu pandemi atau wabah penyakit. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi strategi penanggulangan bencana pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pada tahun 2020. Strategi, dan implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertujuan untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. Upaya-upaya tersebut juga memberikan dampak bagi dunia usaha, seperti UMKM serta masyarakat Kabupaten Bogor. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dan data penelitian diperoleh dari informan yang telah dipilih, lalu dianalisis dengan teori yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah, strategi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani Covid-19 berbasis masyarakat dan berbasis rumah sakit dengan melaksanakan *tracing*, dilanjutkan dengan *swab test* secara berkala setiap minggu dan *treatment* agar tidak menulari lingkungan terdekatnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, strategi dan implementasi dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan cukup baik untuk mencegah timbulnya klaster-klaster baru dan menghambat percepatan persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Penanggulangan Bencana, Pandemi, Covid-19

## **ABSTRACT**

### **COVID-19 PANDEMIC DISASTER MANAGEMENT STRATEGY IN KABUPATEN BOGOR ON 2020**

**RISMA SURYANI PURWANTO**

*Disaster is one of the aspects that the Government of Indonesia really cares about, both natural, non-natural and social disasters. Covid-19 in Indonesia in March 2020 was declared a national disaster as a non-natural disaster, namely a pandemic or disease outbreak. The problems in this study include the Covid-19 pandemic disaster management strategy carried out by the Bogor Regency Government in 2020. The strategy and implementation carried out by the Bogor Regency Government aims to break the chain of the spread of Covid-19. These efforts also have an impact on the business world, such as MSMEs and the people of Bogor Regency. The research methodology used in this research is descriptive qualitative method, and the research data is obtained from selected informants, then analyzed by the theory used. The results of this study were the strategy of the Bogor Regency Government in dealing with community-based and hospital-based Covid-19 by conducting tracing, followed by routine weekly swab tests and medication so as not to infected the nearest environment. The conclusion of this study was that the strategy and implementation in the response to the Covid-19 pandemic disaster in Bogor Regency were implemented well enough to prevented the emergence of new clusters and hinder the acceleration of the spreaded of Covid-19 in Bogor Regency.*

*Keywords: National Security, Disaster Management, Pandemic, Covid-19*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
LEMBAR ORISIONALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB 2 KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR.....</b>	<b>14</b>
2.1 Teori Manajemen Bencana.....	14
2.2 Teori Pandemi Bencana.....	16
2.3 Teori Strategi.....	20
2.4 Konsep Penanggulangan Wabah Penyakit.....	23
2.5 Teori Dampak Bencana.....	28
2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	29
2.7 Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Desain Penelitian.....	38

3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.2.1	Tempat Penelitian.....	40
3.2.2	Waktu Penelitian.....	40
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
3.3.1	Subyek Penelitian.....	43
3.3.2	Obyek Penelitian.....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
3.6	Teknik Analisa Data.....	48
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>51</b>
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	51
4.2	Hasil Penelitian.....	56
4.2.1	Strategi dan Implementasi Pandemi Covid-19.....	57
4.2.2	Dampak Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor.....	71
4.2.3.1	Dampak Bagi Dunia Usaha (UMKM).....	71
4.2.3.2	Dampak Bagi Masyarakat.....	73
4.3	Pembahasan.....	80
4.3.1	Strategi dan Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor.....	80
4.3.2	Dampak Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor.....	94
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>		<b>96</b>
5.1	Kesimpulan.....	96
5.1.1	Kebijakan, Strategi dan Implementasi Covid-19.....	96
5.1.2	Dampak Pandemi Covid-19 di Kab. Bogor.....	98
5.2	Rekomendasi.....	100
5.2.1	Rekomendasi Teoretis.....	100
5.2.2	Rekomendasi Praktis.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>145</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sebaran Covid-19 Kab. Bogor per 13 April 2020.....	7
Gambar 1.2 Sebaran Covid-19 Kab. Bogor per 22 April 2020.....	8
Gambar 1.3 Monitoring Infeksi Covid-19 Kab. Bogor per 9 Mei 2020.....	8
Gambar 1.4 Sebaran Covid-19 Kab. Bogor per 17 Juni 2020.....	10
Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana.....	18
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 3.1 Skema Triangulasi Sumber.....	47
Gambar 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	48
Gambar 4.1 Wilayah Kabupaten Bogor.....	52
Gambar 4.2 SK Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Kab.Bogor.....	56
Gambar 4.3 Pasar Cileungsi Klaster Covid-19.....	61
Gambar 4.4 Penertiban di Kec. Cibinong.....	64
Gambar 4.5 Pembagian Bantuan Covid-19 di Kec. Dramaga.....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4.1 Bantuan Logistik Covid-19.....	65
Tabel 4.2 Matriks Kebijakan Instansi.....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	110
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	112
Lampiran 4. Data Informan.....	116
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Penelitian.....	121
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	153

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang tidak pernah terlepas dari bencana, baik alam, nonalam, maupun bencana sosial. Terutama bencana alam yang menyebabkan banyak korban jiwa, luka-luka, hilang, maupun kerusakan lingkungan juga hilangnya harta benda. Bencana merupakan fenomena yang kejadiannya akan berulang dalam kurun waktu tertentu, meskipun dalam jangka waktu yang sangat lama hingga kerap terlupakan oleh masyarakat.

Setiap bencana yang terjadi memiliki karakteristik tersendiri dan juga upaya penanganan yang berbeda. Upaya penanggulangan bencana yang terjadi merupakan strategi dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut bergantung pada jenis bencana yang terjadi dan lokasi dimana bencana tersebut terjadi. Sehingga tidak ada bencana yang dapat disamakan antara satu bencana dengan bencana yang lain, meskipun jenis bencana yang terjadi adalah sama atau pernah terjadi sebelumnya.

Anggapan masyarakat Indonesia mengenai bencana yang sering terjadi adalah bencana alam. Namun pada tahun 2020, negara Indonesia juga negara-negara di dunia mengalami pandemi oleh virus *corona* yang disebut dengan Covid-19 (Adityo Susilo, 2020). Bencana bermula dari merebaknya Covid-19 di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Kemudian terus tersebar ke negara-negara terdekat, kemudian ke seluruh dunia dan ditetapkan sebagai wabah pandemi karena telah menjangkit penduduk di lebih dari 200 negara sejak bulan Maret 2020 yang menjadikan adanya perubahan dari kehidupan sehari-hari yaitu adanya kekhawatiran dan kecemasan terhadap kesehatan dan keselamatan diri.

Statistik kasus COVID-19 yang tercatat di Indonesia sejak awal masa pandemi pada bulan Maret 2020 hingga bulan Agustus 2020 sudah terkonfirmasi lebih dari 150.000 kasus, dengan pasien sembuh sebanyak 105.198 kasus dan pasien meninggal sebanyak 6.594 kasus (Situs Resmi Gugus Tugas Covid-19, Agustus 2020). Statistik kasus COVID-19 yang tercatat di Jawa Barat sudah terkonfirmasi lebih dari 9.000 kasus dengan total pasien sembuh sebanyak 5.881 kasus dan total pasien meninggal dunia sebanyak 263 kasus (Situs Resmi Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat, Agustus 2020). Statistik kasus COVID-19 yang tercatat di Kabupaten Bogor sudah terkonfirmasi lebih dari 700 kasus dengan pasien sembuh sebanyak 404 kasus dan pasien meninggal sebanyak 32 kasus (Situs Resmi Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor, Agustus 2020).

Wabah pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Berbagai kebijakan dan upaya terus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam memutus rantai persebaran Covid-19 ini. Mulai dari *social distancing* atau *physical distancing* dengan diberhentikan sementara bekerja dan sekolah secara tatap muka, digantikan dengan *Work from Home* dan *School from Home*.

Namun dengan berbagai dinamika yang terjadi setelah penerapan kebijakan tersebut, dan juga dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia yang juga pada setiap daerah berbeda kekuatannya, kebijakan tersebut belum menampakkan hasil yang optimal. Faktor lain yang juga mempengaruhi persebaran wabah pandemi Covid-19 ialah kebersihan. Dilarang untuk memegang mulut, mata dan hidung apabila belum mencuci tangan hingga bersih.

Kebijakan lain yang dicanangkan oleh pemerintah ialah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang saat ini tengah diterapkan oleh Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan Gubernur dan juga di daerah-

daerah di Jawa Barat. Penerapan PSBB merupakan upaya lain dari Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah-pemerintah daerah terus mengupayakan untuk merumuskan kebijakan yang juga dapat menolong masyarakatnya.

Demikian pula yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* dengan diberhentikan sementara bekerja dan sekolah secara tatap muka, digantikan dengan *Work from Home* dan *School from Home* telah diberlakukan sejak pemerintah pusat yang dalam hal ini ialah Presiden mengumumkan kebijakan tersebut untuk dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2020 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Kemenpan RB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah,.

Di Kabupaten Bogor, beberapa kecamatan telah ditetapkan sebagai zona merah. Perpanjangan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* dengan diberhentikan sementara bekerja dan sekolah secara tatap muka, digantikan dengan *Work from Home* dan *School from Home* telah diputuskan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jumlah titik atau zona merah di Kabupaten Bogor bertambah setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama tujuh hari. Total 17 wilayah ditetapkan sebagai zona merah. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin melalui diskusi virtual program Crosscheck bertemakan Resah Daerah Tangkal Wabah, Minggu, 26 April 2020 mengatakan bahwa sebelum PSBB ada 13 kecamatan yang menjadi zona merah, tapi ternyata setelah PSBB bertambah menjadi 17 kecamatan yang menjadi zona merah. Salah satu faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah zona

merah karena masih banyak warga yang keluar masuk Jakarta. Mereka terpaksa bekerja di kantor karena perusahaannya tidak menerapkan *Work From Home* (WFH) (Martaon, 2020).

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengeluhkan masih banyaknya pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten Bogor yang masih beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dikatakan bahwa banyak pabrik yang masih tetap beroperasi dengan argumen mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, karena pabrik-pabrik tersebut memproduksi kebutuhan untuk ekspor-impor. Kontradiktif antara Peraturan Bupati yang dikeluarkan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bahwa pabrik yang bergerak dalam bidang ekspor-impor dibolehkan beroperasi. Menjadi sulit ketika akan ditegakkan hukum bahwa dengan adanya surat peraturan dari Kementerian Perindustrian yang mengecualikan (Ramadhani, 2020).

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengutip hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat bahwa PSBB yang telah dilakukan di wilayah Bodebek berjalan kurang efektif karena beberapa hal, di antaranya: rendahnya kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi yang lemah (Saudale, 2020). Seperti yang terjadi di Puncak, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dimana sejumlah warga tetap berwisata di kebun teh di tepian jalan raya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Meskipun PSBB masih diberlakukan dan sejumlah tempat wisata tutup, tak sedikit wisatawan yang mengunjungi kawasan Puncak (Kompas, 2020). Kesadaran masyarakat di Bogor tergolong rendah karena sebagian masyarakat yang tidak percaya bahwa persebaran Covid-19 adalah nyata. Seperti hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor bahwa masyarakat Bogor yang percaya bahwa persebaran Covid-19 adalah nyata hanya 15%.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penyangga DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Kabupaten Bogor juga merupakan daerah

dengan penduduk terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduknya lebih dari 5,3 juta jiwa. Hal tersebut menjadikan banyak dari penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja di Jakarta, yang dalam kondisi saat ini DKI Jakarta merupakan episentrum dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kemudahan mobilitasi manusia mulai dari sarana transportasi dan infrastruktur juga harus diwaspadai untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Dengan tingginya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang memanfaatkan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari sangat memungkinkan untuk terinfeksi wabah pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan masyarakat dan juga dapat dikatakan mengancam keamanan nasional karena telah tersebar dengan begitu masif dan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Pasalnya, jika transportasi publik seperti *Commuter Line* dari dan menuju Jakarta diberhentioperasikan maka akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor yang bekerja di Jakarta. Demikian juga dengan sumber daya hasil pertanian logistik dari Bogor ke Jakarta yang akan berdampak pada tersedianya stok logistik di Jakarta untuk membantu masyarakat prasejahtera di Jakarta. Bupati Bogor mendesak agar pemerintah menghentikan sementara KRL. Diharapkan, upaya tersebut mampu mengurangi penyebaran virus korona. Namun ternyata permintaan tersebut tidak disetujui, karena dianggap bahwa permintaannya terlalu berlebihan.

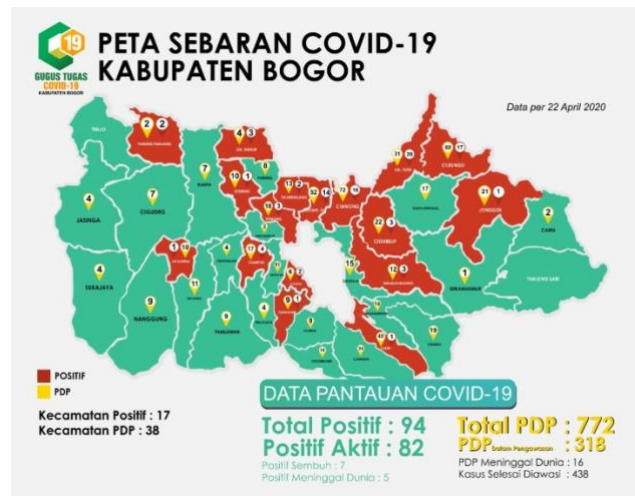
Kebijakan PSBB atau karantina wilayah yang diterapkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat menurun, juga banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga tidak memiliki tempat tinggal yang membuat angka kemiskinan semakin meningkat dan kriminalitas yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat juga meningkat. Dengan munculnya ancaman-ancaman bagi masyarakat yang juga mengancam keamanan nasional maka pemerintah harus segera

merumuskan kebijakan yang secara efisien dapat menanggulangi bencana wabah pandemi Covid-19 di Indonesia secara umum, serta di Kabupaten Bogor secara khusus.



Gambar 1.1: Sebaran Covid-19 Kabupaten Bogor per 13 April 2020  
Sumber: Situs Resmi Kab. Bogor, diakses pada tanggal 6 Mei 2020

Kebijakan PSBB mulai diterapkan di Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/234/Kpts/Per-UU/2020 sejak tanggal 15 April 2020 selama dua pekan hingga tanggal 28 April 2020. Namun, berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Bogor, sejak diberlakukannya PSBB sejak 15 April 2020 hingga 28 April 2020 masih ditemukannya bukti penyebaran Covid-19 dengan meningkatnya kasus Covid-19 sehingga diperlukan perpanjangan pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor terhitung sejak tanggal 29 April 2020 selama dua pekan berikutnya hingga tanggal 12 Mei 2020 (Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/258/Kpts/Per-UU/2020).



Gambar 1.2: Sebaran Covid-19 Kabupaten Bogor per 22 April 2020  
Sumber: Situs Resmi Kab. Bogor diakses pada tanggal 7 Mei 2020



Gambar 1.3: Monitoring Infeksi Covid-19 Kab. Bogor tanggal 9 Mei 2020

Sumber: Situs Resmi Kab. Bogor diakses pada tanggal 11 Mei 2020

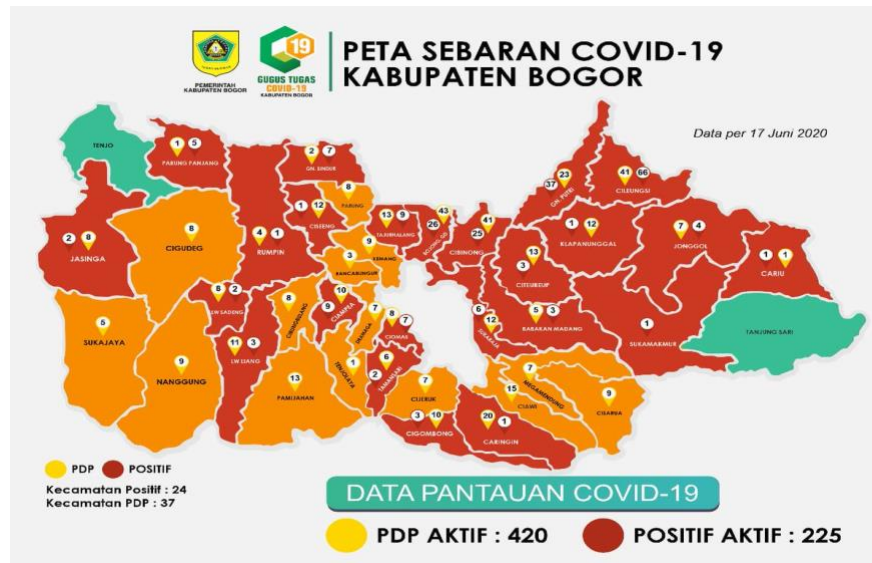
Berdasarkan data yang tercatat sebagai Data Monitoring Harian Kewaspadaan Infeksi Covid-19 Kabupaten Bogor tanggal 9 Mei 2020 menunjukkan bahwa pada pelaksanaan PSBB tahap dua tetap ditemukan peningkatan dari penyebaran Covid-19 dengan bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dengan kondisi demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa 70.000 paket sembako bagi masyarakat

Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong pada tanggal 13 Mei 2020 (Situs Kabupaten Bogor, 2020). Selain bertambahnya kasus positif terinfeksi Covid-19, di Kabupaten Bogor juga mengalami peningkatan pekerja yang dirumahkan dan juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang dirumahkan sebanyak 9.023 pekerja, sedangkan yang mengalami PHK sebanyak 577 pekerja, dari 148 perusahaan atau instansi yang memberikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor (Media Online Radar Bogor, 2020).

PSBB terus diperpanjang seiring dengan meningkatnya zona merah di Kabupaten Bogor menjadi 23 kecamatan terhitung dari tanggal 10 Juni 2020, juga untuk mendukung perpanjangan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Setelah PSBB diperpanjang hingga Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2020, PSBB kembali diperpanjang hingga tanggal 2 Juli 2020 bagi Bodebek yang merupakan daerah penyangga DKI Jakarta. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020, PSBB secara proporsional diberlakukan sejak tanggal 5 Juni hingga 2 Juli 2020 sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bogor. Namun kasus positif terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Bogor juga bertambah seiring waktu. Terpantau hingga tanggal 23 Juni 2020, total kasus positif terkonfirmasi menjadi 345 kasus (Media Online Ayo Bogor, 2020).

PSBB secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Bogor kembali diperpanjang sejak tanggal 3 hingga 16 Juli 2020 berdasarkan Perbup No. 42 Tahun 2020 tentang PSBB Praadaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kemudian kembali diperpanjang hingga tanggal 10 September 2020 berdasarkan dengan Perbup yang sama, dimana Kab. Bogor tidak lagi menerbitkan Perbup yang baru melainkan tetap mengacu

pada Perbup No. 42 Tahun 2020 tentang PSBB Praadaptasi Kebiasaan Baru (AKB).



Gambar 1.4: Sebaran Covid-19 Kabupaten Bogor per 17 Juni 2020  
Sumber: Situs Resmi Kab. Bogor diakses pada tanggal 15 Juli 2020

Kabupaten Bogor selain menjadi daerah rawan dalam penyebaran Covid-19 karena merupakan salah satu daerah penyangga ibukota negara DKI Jakarta, juga merupakan daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi, seperti tanah longsor (Fauzielly, Jurnallah, Jihadi, Aditio, Ramadhan, dan Mufti, 2018) yang dapat terjadi dalam setiap tahun. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, kebijakan seperti PSBB yang telah dan sedang diterapkan di Kabupaten Bogor seharusnya dapat menurunkan persebaran Covid-19 di masyarakat, namun yang terjadi pada pelaksanaannya tidak demikian, seperti kasus masyarakat yang terpapar terus meningkat dan wilayah yang terpapar juga semakin meluas di Kabupaten Bogor, meskipun berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam kebijakan yang dirumuskan hingga dilaksanakan. Oleh karena adanya kondisi dan permasalahan tersebut di Kabupaten Bogor, penelitian ini terkait dengan upaya penanggulangan bencana pandemi

Covid-19 untuk mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi meski dalam kondisi pandemi Covid-19 dari perspektif keamanan nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagai daerah penyangga ibukota negara, kebijakan seperti PSBB yang telah dan sedang diterapkan di Kabupaten Bogor seharusnya dapat menurunkan persebaran Covid-19 di masyarakat, namun yang terjadi pada pelaksanaannya tidak demikian, seperti kasus masyarakat yang terpapar terus meningkat dan wilayah yang terpapar juga semakin meluas di Kabupaten Bogor, meskipun berbagai strategi dan upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam kebijakan yang dirumuskan hingga dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana strategi, dan implementasi dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020?
- b. Bagaimana dampak dari implementasi bagi pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

- a. Menganalisis strategi, implementasi penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020.
- b. Menganalisis dampak implementasi bagi pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pertahanan, khususnya aspek manajemen bencana sebagai strategi penanggulangan bencana pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
- b. Manfaat Praktis penelitian ini dapat berkontribusi sebagai salah satu bahan masukan dan/atau pertimbangan dalam membuat strategi penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020, antara lain:
  - 1) Pemerintah: Sebagai bahan pertimbangan bagi *decision maker* yaitu pembuatan keputusan dalam bentuk kebijakan.
  - 2) Dunia Usaha: Sebagai sumber informasi juga sebagai bahan pertimbangan bagi Lembaga/instansi/perusahaan yang terkait untuk penanganan bencana pandemi Covid-19.
  - 3) Masyarakat: Sebagai sumber informasi bagi masyarakat secara umum dan masyarakat Kabupaten Bogor secara khusus.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Manajemen Bencana

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit” (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

“Bencana didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.” (UNISDR *Terminology on Disaster Risk Reduction*, 2009). Terdapat dua jenis utama bencana, yaitu: bencana alam dan bencana teknologi (UN/ISDR, 2002).

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi” (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Bencana memungkinkan terjadi karena adanya dua kondisi, yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak yang disebut sebagai ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) yang dimiliki oleh masyarakat. Bila terjadi ancaman atau *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan yang dalam hal ini dikatakan memiliki kapasitas (*capacity*), maka masyarakat tersebut akan dapat menghadapi atau mengatasi peristiwa yang mengganggu dengan kemampuannya sendiri. Sementara, bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.

Suatu bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bencana} = \text{Bahaya} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

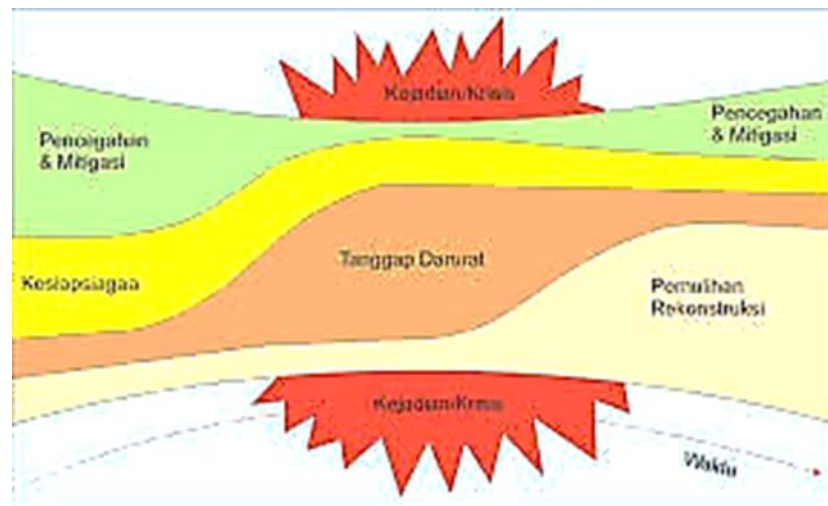
Menurut Nurjanah, et.al (2011) dalam bukunya tentang Manajemen Bencana, penyebab terjadinya bencana ada 3 faktor, yakni:

- a. Faktor alam (*natural disaster*) terjadi karena fenomena alam dan tanpa adanya campur tangan manusia.
- b. Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan juga dari perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial atau manusia (*man made disaster*) yang terjadi murni karena perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, terorisme dan sebagainya.

Berdasarkan teori mengenai bencana seperti yang tertera di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa bencana pandemi digolongkan menjadi bencana non alam yaitu merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh adanya persebaran wabah penyakit. Wabah penyakit dapat tersebar dikarenakan oleh faktor alam maupun faktor non alam. Wabah penyakit yang dimaksud dalam penelitian ini tersebar melalui faktor alam.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Manajemen bencana merupakan suatu kesatuan siklus yang dimulai dengan tahap pra bencana atau sebelum terjadinya bencana; berlanjut ketika terjadinya bencana atau tahap tanggap darurat;

kemudian setelah terjadinya bencana atau tahap pasca bencana (Syamsul Maarif, 2019).



Gambar 2.1: Siklus Manajemen Bencana

Sumber: Situs Ditjenbinaadwil Kemendagri diakses pada tanggal 18 Mei 2020

Menurut Warfield dalam situs resmi BPBD Kab. Bogor, manajemen bencana mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi, atau mencegah kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya bencana,
- 2) Menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap para korban bencana,
- 3) Mencapai pemulihan yang cepat dan efektif.

Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran bagaimana rencana dibuat untuk mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana, bagaimana reaksi dilakukan selama dan segera setelah bencana berlangsung dan bagaimana langkah-langkah diambil untuk pemulihan setelah bencana terjadi.

Secara garis besar terdapat empat fase manajemen bencana, yaitu:

1. Fase Mitigasi: sebagai fase dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif bencana. Contoh: zonasi dan pengaturan bangunan (*building codes*), analisis kerentanan; serta pembelajaran publik atau edukasi.
2. Fase Kesiapsiagaan: sebagai fase untuk merencanakan bagaimana upaya menanggapi bencana. Contoh: merencanakan kesiagaan; latihan keadaan darurat, dan mengadakan sistem peringatan.
3. Fase Respon: sebagai fase dalam upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh bencana saat terjadi. Contoh: pencarian dan pertolongan bagi para korban terdampak; melakukan kaji cepat dan tindakan darurat lainnya,
4. Fase Pemulihan: sebagai fase dalam mengembalikan masyarakat ke kondisi normalnya. Contoh: perumahan sementara (*huntara*), bantuan keuangan; serta perawatan kesehatan.

Keempat fase manajemen bencana tersebut tidak harus selalu ada, atau tidak secara terpisah, atau tidak harus dilaksanakan dengan urutan seperti tersebut diatas. Fase-fase sering saling *overlap* dan lama berlangsungnya setiap fase bergantung pada kehebatan atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Dengan demikian, kaitannya dengan penentuan tindakan di dalam setiap fase itu, perlu dipahami karakteristik dari setiap bencana yang mungkin terjadi.

Dari uraian dari para ahli di atas mengenai bencana, maka yang dimaksud dengan bencana pada penelitian ini adalah bencana non alam berupa fenomena pandemi yang terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat hingga menyebabkan kerugian secara materi, hingga terjadinya gangguan psikologis juga perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat dan lingkungannya. Bencana non alam ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Adapun penanggulangan bencana atau manajemen bencana yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penanggulangan bencana non alam berupa pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bogor.

## **2.2 Teori Pandemi Bencana**

Menurut WHO (2007: 7) pandemi ialah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan beberapa negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Di Indonesia wabah penyakit yang pernah menyerang adalah: penyakit cacar menyerang Ternate tahun 1558 dan di Ambon tahun 1564 (Widjajo Nitisastro, 1970). Istilah pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai contoh wabah virus Zika yang dimulai di Brasil pada 2014 dan menyebar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016 (Seráfica Gischa, 2020).

Pandemi biasa digunakan untuk merujuk ke wabah yang memiliki skala global. Wabah penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa (Kemenkes RI, 2006). Setiap pandemi yang terjadi diberbagai belahan dunia dan periode waktu tertentu selalu

menimbulkan korban jiwa yang besar. Sejarawan Universitas John Hopkins, Mary Fissell mengatakan, sejarawan menggambarkan tiga gelombang wabah besar: Wabah Justinian, pada abad keenam; epidemi abad pertengahan, pada abad ke-14; dan pandemi yang melanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Oleh karena itu kita harus ekstra waspada dan tidak boleh menganggap remeh. Berikut beberapa virus dan penyakit yang penyebarannya mencapai tingkat dunia:

a. Virus ebola

Kendati sudah terdeteksi pada tahun 1976 di wilayah Kongo, virus ini baru tersebar secara masif di periode 2013-2016. Dalam penyebaran di periode terakhir itu, WHO menetapkan penyebaran virus ebola sebagai PHEIC. Itu sebabnya, beberapa penerbitan populer juga menyebut ebola sebagai pandemi.

b. Flu babi atau Swine Flu

Penyakit yang disebabkan oleh virus H1N1 ini merupakan yang terakhir yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Pertama kali terdeteksi di Meksiko pada 2009, virus H1N1 menyebar ke berbagai kawasan di Amerika Serikat dan negara lain, setahun kemudian. Flu babi mengakibatkan sekitar setengah juta korban jiwa di seluruh dunia.

c. Sindrom Pernafasan Akut (SARS)

Karena memiliki banyak kesamaan, penyakit ini kerap diperbandingkan dengan Covid-19. Salah satu kesamaan itu adalah nama virus yang menyebabkan SARS dan Covid-19, yaitu corona. Struktur dari kedua virus corona itu pun disebut-sebut sangat mirip. Sama seperti Covid-19, SARS pertama kali tercatat di China. Setelah terekam di 2003, SARS kemudian menyebar ke sedikitnya 17 negara lainnya. Kendati menyebabkan korban jiwa hingga mendekati 800 nyawa di sekitar 18 negara, SARS tidak diklasifikasikan sebagai pandemi.

d. Flu Spanyol

Di luar ketiga virus di atas, sejarah dunia juga pernah mencatat penyebaran wabah penyakit yang sangat luas. Salah satunya flu Spanyol. Penyakit ini mencengkeram dunia selama 1918 sampai 1920. Pergerakan tentara yang terjadi di masa Perang Dunia Pertama turut memperparah penyebaran virus penyakit ini. Sebanyak 500 juta orang disebut-sebut terinfeksi virus flu Spanyol. Sementara korban jiwa akibat penyakit ini berdasarkan wikipedia setidaknya mencapai 50-100 juta jiwa.

e. Kolera

Wabah kolera terjadi paling tidak 10 kali selama abad ke-19 hingga abad ke-20. Dan, total jumlah korban jiwa akibat wabah kolera diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa. Di Indonesia, kolera terakhir kali menjadi wabah di sekitar tahun 1960-an hingga pertengahan dekade 1970-an.

Dari uraian dari para ahli di atas mengenai pandemi yang menjadi bencana, maka yang dimaksud dengan pandemi yang menjadi bencana pada penelitian ini adalah penyebaran wabah penyakit yang disebut dengan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Penyebaran Covid-19 sangat masif. WHO menyatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi dikarenakan Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Pandemi Covid-19 menyebar secara *droplet*. *Droplet* ditimbulkan dari orang (sumber) yang terinfeksi terutama selama terjadinya batuk, bersin, dan berbicara. Penularan terjadi bila droplet yang mengandung mikroorganisme ini tersembur dalam jarak dekat (biasanya <1 meter) melalui udara dan terdeposit di mukosa mata, mulut, hidung, tenggorokan, atau faring orang lain. Karena droplet tidak terus melayang di udara, penanganan udara dan ventilasi khusus tidak diperlukan untuk mencegah penularan melalui droplet (WHO, 2007: 9).

### 2.3 Teori Strategi

Strategi mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi: Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan

sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals).

Manajemen strategis terdiri dari keputusan dan tindakan yang digunakan untuk menerapkan strategi yang akan memberikan cocok kompetitif unggul antara organisasi dan lingkungannya, untuk memungkinkan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga dapat digambarkan sebagai proses manajemen yang diperlukan untuk memungkinkan organisasi untuk berpindah dari tempat sekarang ke tempat itu ingin menjadi di masa depan. Ini adalah tentang rasa arah dan menyelaraskan dengan tujuan organisasi. Manajemen strategis adalah terlibat dalam semua bidang manajemen, itu tidak sama dengan manajemen sehari-hari karena itu berkaitan dengan isu-isu yang mempengaruhi dasar-dasar organisasi. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengaturan arah strategis bagi suatu organisasi. Manajemen strategis dapat menjadi tugas yang paling kompleks yang dihadapi setiap tim manajemen puncak karena strategi adalah tentang masa depan yang tidak diketahui, ada banyak cara maju bahwa organisasi dapat mengikuti dan lingkungan yang kompetitif untuk organisasi yang dinamis satu, tidak satu yang masih ada atau seluruhnya diprediksi.

#### a. Strategi Berbasis Komunitas

Strategi berbasis komunitas adalah sekumpulan orang dalam satu grup yang punya satu ide besar dan jalur komunikasi yang jelas. Menggunakan komunitas sebagai basis untuk merespons krisis memang merupakan langkah yang tepat menurut Russell Dynes (1998). Komunitas merupakan bentuk universal dari kehidupan sosial (universal form of social life) yang memiliki kapasitas untuk menanggapi bencana. Komunitas adalah tempat di mana tindakan sosial (social action) muncul untuk menanggapi konsekuensi dan tantangan dari bencana. Dengan perkataan lain, efek atau

dampak bencana indikatornya adalah tindakan-tindakan adaptif yang dilakukan komunitas. Eksistensi komunitas amat penting untuk menanggapi krisis tak terkecuali krisis akibat pandemi covid-19, namun mendefinisikan apa itu komunitas bukan perkara yang mudah. Sebagai bukti, 65 tahun yang lalu (1955) George Hillery mendapati setidaknya ada 94 definisi komunitas.

#### b. Strategi Berbasis Rumah Sakit

Pada situasi bencana, Rumah Sakit akan menjadi tujuan akhir dalam menangani korban sehingga Rumah Sakit harus melakukan persiapan yang cukup. Sesuai amanah dari Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Bab VIII Pasal 29 huruf f, menyebutkan kewajiban RS untuk melaksanakan fungsi social dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien khususnya pada saat terjadi bencana dan kondisi kedaruratan. Persiapan tersebut dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk menyusun perencanaan menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, yang juga dimaksudkan agar RS tetap bisa berfungsi-hari terhadap pasien yang sudah ada sebelumnya (business continuity plan). Rencana tersebut umumnya disebut sebagai Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit, atau Hospital Disaster Plan (HDP) Pandemi COVID 19 yang terjadi saat ini dapat diklasifikasikan sebagai kondisi kedaruratan atau bencana. Organisasi kesehatan dunia, WHO, telah mengumumkan status keadaan darurat global wabah COVID-19 dengan pertimbangan meningkatnya jumlah korban meninggal dunia akibat virus yang kini telah menyebar ke sejumlah negara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 pada 4 Februari 2020 telah menetapkan COVID-19 Sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya. Ketika terjadi bencana, selalu akan terjadi keadaan yang kacau (chaos), yang bisa mengganggu proses penanganan pasien, dan mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Dengan Disaster Plan yang baik, chaos akan tetap terjadi, tetapi diusahakan agar waktunya sesingkat

mungkin sehingga pelayanan dapat tetap dilakukan sesuai standard yang ditetapkan, sehingga mortalitas dan moriditas dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan pada uraian dari para ahli di atas mengenai strategi, maka yang dimaksud dengan strategi pada penelitian ini, dalam hal ini merupakan strategi dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 yang didasarkan pada strategi berbasis komunitas dan strategi berbasis rumah sakit. Selanjutnya strategi dalam penelitian ini adalah kaitannya dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memutus rantai persebaran Covid-19 dalam upaya penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupeten Bogor.

#### **2.4 Konsep Penanggulangan Wabah Penyakit**

Dalam penanganan wabah penyakit menular, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia bahwa wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga akan mengancam pertahanan negara. Selaras dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 03 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bahwa Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

dikatakan bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan laporan akhir tim analisis dan evaluasi hukum tentang wabah penyakit menular Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (2005: 13) menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dilaksanakan dengan tujuan untuk memutus rantai penularan sehingga jumlah kesakitan, kematian maupun luas daerah yang terserang dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam operasionalnya maka kegiatan penanggulangan selalu disertai kegiatan penyelidikan yang selanjutnya digunakan istilah penyelidikan dan penanggulangan KLB. Upaya penyelidikan dan penanggulangan secara garis besar meliputi:

a. Persiapan Penyelidikan dan Penanggulangan KLB.

Persiapan penyelidikan dan penanggulangan KLB meliputi persiapan administrasi, tim penyelidikan epidemiologi, bahan logistik dan bahan laboratorium serta rencana kerja penyelidikan epidemiologi KLB. Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi KLB bekerjasama dengan unit kesehatan terkait setempat, dapat melakukan wawancara, pemeriksaan medis dan laboratorium terhadap penderita, pemeriksaan orang-orang yang mendapat serangan penyakit, pemeriksaan sumber-sumber penyebaran penyakit, pemeriksaan data perawatan penderita di unit-unit pelayanan kesehatan, pemeriksaan data perorangan, sekolah, asrama, dan tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan penyebaran penyakit dengan memperhatikan etika pemeriksaan medis dan etika kemasyarakatan setempat. Rekomendasi dirumuskan dengan memperhatikan asas segera, efektif dan efisien dalam rangka penanggulangan KLB yang sedang berlangsung sesuai dengan

kemampuan yang ada serta disampaikan kepada tim penanggulangan KLB dengan memperhatikan kerahasiaan jabatan dan implikasi terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

b. Memastikan adanya KLB

Kepastian adanya suatu KLB berdasarkan pengertian kriteria kerja KLB yang secara formal ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, baik bersumber data kesakitan dan atau data kematian yang ada di masyarakat, maupun bersumber data kesakitan dan atau kematian yang ada di unit-unit pelayanan penderita serta hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk memastikan adanya KLB, maka data penderita setidaknya menunjukkan perkembangan penyakit dari waktu ke waktu berdasarkan tanggal mulai sakit dan atau tanggal berobat yang dapat digunakan untuk memperkirakan tanggal mulai sakit, tempat kejadian menurut unit pelayanan penderita berobat, tempat tinggal penderita, tempat usaha atau karakteristik tempat lain, serta menurut umur, jenis kelamin dan kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan adanya KLB. Secara operasional, langkah-langkah untuk memastikan adanya KLB adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan analisis terhadap data kesakitan dan kematian yang ada di Puskesmas atau Rumah Sakit.
- 2) Mendiskusikan dengan petugas poliklinik tentang adanya peningkatan jumlah penderita atau diduga penderita penyakit berpotensi KLB diantara yang berobat ke poliklinik menurut desa atau lokasi tertentu.
- 3) Menanyakan pada setiap orang yang datang berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit tentang adanya peningkatan jumlah penderita atau diduga penderita penyakit berpotensi KLB tertentu atau adanya peningkatan jumlah kematian di desa, sekolah, asrama atau tempat lain. Peningkatan jumlah penderita dibandingkan dengan kewajaran jumlah penderita pada keadaan normal

berdasarkan data yang ada di Puskesmas atau menurut pandangan orang-orang yang diwawancarai.

- 4) Melakukan kunjungan ke lokasi yang diduga terjadi KLB untuk memastikan adanya KLB. Tatacara memastikan adanya KLB adalah dengan wawancara penduduk setempat melalui survei masyarakat, dan atau dengan membuka pelayanan pengobatan umum. Apabila jumlah penderita dan atau kematian cukup banyak dan meningkat dibandingkan jumlah penderita pada keadaan sebelumnya sesuai dengan kriteria kerja KLB, maka dapat dipastikan adanya KLB di daerah tersebut.

c. Menegakkan Etiologi KLB

- 1) Etiologi suatu KLB dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis penderita perorangan, gambaran klinis kelompok, gambaran epidemiologi dan hasil pemeriksaan laboratorium atau alat penunjang pemeriksaan lainnya.
- 2) Gambaran klinis penderita perorangan dapat diperoleh berdasarkan wawancara dan pemeriksaan medis penderita, gambaran klinis kelompok penderita dapat diperoleh dari prosentase gejala dan tanda-tanda penyakit yang ada pada sekelompok penderita pada daerah yang terjadi KLB.
- 3) Gambaran epidemiologi dibuat dalam bentuk kurva epidemiologi KLB, angka serangan (attack rate) dan angka fatalitas kasus (case fatality rate) berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin. Gambaran epidemiologi lain dapat dibuat berdasarkan pengelompokan tertentu sesuai dengan kebutuhan mengetahui etiologi KLB.
- 4) Pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa spesimen tertentu sesuai dengan perkiraan etiologi berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan epidemiologi. Bahan spesimen yang menimbulkan perlukaan atau risiko perlukaan diupayakan hanya diambil dari beberapa orang saja sebagai contoh pengujian laboratorium.

d. Identifikasi Gambaran Epidemiologi KLB

- 1) Gambaran epidemiologi KLB menjelaskan distribusi penyebaran penyakit dalam bentuk tabel, kurva epidemi, grafik dan peta, baik dalam angka absolut maupun dalam angka serangan (attack rate), dan angka fatalitas kasus (case fatality rate) berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, dan tempat-tempat tertentu yang bermakna secara epidemiologi. Umur dikelompokkan dalam kelompok umur kurang dari 1 tahun, 1 –4 tahun, 5 –9 tahun , 10 –14 tahun, 15 –44 tahun dan 45 tahun atau lebih, sesuai dengan kebutuhan epidemiologi menurut umur. Tempat dikelompokkan berdasarkan tempat kejadian. Gambaran epidemiologi lain dapat dibuat berdasarkan pengelompokan tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk mengetahui etiologi KLB, besar masalah KLB dan menjadi dasar membangun hipotesis sumber dan cara penyebaran penyakit.
- 2) Gambaran epidemiologi KLB juga bermanfaat sebagai data epidemiologi KLB dalam sistem kewaspadaan dini KLB dan referensi perumusan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program penanggulangan KLB.

e. Mengetahui Sumber dan Cara Penyebaran KLB

Cara untuk mengetahui sumber dan cara penyebaran penyakit adalah berdasarkan metode epidemiologi deskriptif, analitik dan kesesuaian hasil pemeriksaan laboratorium antara penderita dan sumber penyebaran penyakit yang dicurigai.

f. Menetapkan Cara-Cara Penanggulangan KLB

Cara-cara penanggulangan KLB meliputi upaya-upaya pengobatan yang tepat terhadap semua penderita yang ada di unit-unit pelayanan kesehatan dan di lapangan, upaya-upaya pencegahan dengan menghilangkan atau memperkecil peran sumber penyebaran penyakit atau memutuskan rantai penularan pada KLB penyakit menular. Cara-cara penanggulangan KLB sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan masing-masing cara penanggulangan KLB setiap jenis penyakit, keracunan atau

masalah kesehatan tertentu dan penyakit berpotensi KLB yang belum jelas etiologinya.

g. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan salah satu tujuan penting dari suatu penyelidikan dan penanggulangan KLB. Rekomendasi berisi cara-cara penanggulangan KLB yang sedang berlangsung, usulan penyelidikan dan penanggulangan KLB lebih luas dan atau lebih teliti, dan upaya penanggulangan KLB dimasa yang akan datang. Perumusan suatu rekomendasi berdasarkan fakta hasil penyelidikan dan penanggulangan KLB, merujuk hasil-hasil penelitian dan pembahasan para ahli terhadap masalah yang sama atau berkaitan, kemampuan upaya penanggulangan KLB dan kondisi kelompok populasi yang mendapat serangan KLB. Rekomendasi disampaikan kepada tim penanggulangan KLB berdasarkan asas cepat, tepat dan bertanggungjawab untuk segera menghentikan KLB dan mencegah bertambahnya penderita dan kematian pada KLB.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan, penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.

- a. Upaya pencegahan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular.
- b. Upaya pengendalian dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- c. Upaya pemberantasan dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

## 2.5 Teori Dampak Bencana

Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sector lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor dan letusan gunung berapi, dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air (Pan American Health Organization, 2006). Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari berkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular.

Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat relatif berbeda-beda, antara lain tergantung dari jenis dan besaran bencana yang terjadi. Kasus cedera yang memerlukan perawatan medis, misalnya, relatif lebih banyak dijumpai pada bencana gempa bumi dibandingkan dengan kasus cedera akibat banjir dan gelombang pasang. Sebaliknya, bencana banjir yang terjadi dalam waktu relatif lama dapat menyebabkan kerusakan sistem sanitasi dan air bersih, serta menimbulkan potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit-penyakit yang ditularkan melalui media air (*water-borne diseases*) seperti diare dan leptospirosis. Terkait dengan bencana gempa bumi, selain dipengaruhi kekuatan gempa, ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi banyak sedikitnya korban meninggal dan cedera akibat bencana ini, yakni: tipe rumah, waktu pada hari terjadinya gempa dan kepadatan penduduk (Pan American Health Organization, 2006).

Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 (2)

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi:

- a. Bayi, balita dan anak-anak;
- b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. Penyandang cacat; dan
- d. Orang lanjut usia.

Selain keempat kelompok penduduk tersebut, dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar ditambahkan orang sakit sebagai bagian dari kelompok rentan dalam kondisi bencana. Upaya perlindungan tentunya perlu diprioritaskan pada kelompok rentan tersebut, mulai dari penyelamatan, evakuasi, pengamanan sampai dengan pelayanan kesehatan dan psikososial (PPK – LIPI, 2015).

## 2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian mengenai penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dalam perspektif Keamanan Nasional, antara lain:

- a. Dana Riksa Buana. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol 7, No 3*

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaannya adalah variabel pandemi virus corona (Covid-19). Sedangkan perbedaannya adalah variabel perilaku masyarakat, dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa.

- b. Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki. (2020). Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (Covid-19). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3, pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083*

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaannya adalah variabel penyakit Coronavirus (Covid-19). Sedangkan perbedaannya adalah variabel kebijakan pemberlakuan *lockdown* sebagai antisipasi.

- c. Ronny Basirun Simatupang. (2017). Kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme. *Jurnal Manajemen Bencana Vol 3, No 2*

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaannya adalah variabel penanggulangan bencana pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah variabel mengantisipasi ancaman bioterrorisme.

- d. Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, and Counselling Vol. 2 No. 1*

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaannya adalah variabel Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah variabel Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia.

- e. Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 2: 130-139*

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

Persamaannya adalah variabel Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah variabel Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi.

**Tabel 2.1: Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Peneliti, Tahun	Ringkasan Penelitian	Persamaan, Perbedaan
1.	Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa.	Dana Riksa Buana. (2020)	Hasil menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka artikel ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif.	Persamaannya adalah variabel pandemi virus corona (Covid-19). Sedangkan perbedaannya adalah variabel perilaku masyarakat, dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa
2.	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (Covid-19).	Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki. (2020)	Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang terdampak wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah: Persamaannya adalah variabel penyakit Coronavirus (Covid-19). Sedangkan perbedaannya

			penyebaran wabah virus tersebut. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.	adalah variabel pemberlakuan <i>lockdown</i> sebagai antisipasi.
3.	Kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme	Ronny Basirun Simatupang. (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto rata-rata baik dengan rincian perencanaan dan administrasi (86.60%), kapasitas tambahan (79.10%), pendidikan dan latihan	Persamaannya adalah variabel penanggulangan bencana pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah variabel mengantisipasi ancaman bioterrorisme

			<p>(77.70%), Komunikasi (76.90%), dukungan kepegawaian (71.42%), isolasi dan dekontaminasi (94.44%), farmasi (77.77%), laboratorium (83.33%) dan surveilans (91.66%). Kesimpulan yang dapat diambil adalah RSPAD Gatot Soebroto sejauh ini telah memiliki kesiapsiagaan yang baik dalam penanggulangan bencana pandemi influenza. Pembenahan yang perlu dilakukan adalah peningkatan kerjasama dengan rumah sakit lain dan kementerian kesehatan serta peningkatan kualitas SDM melalui penerapan cross training.</p>	
--	--	--	---	--

4.	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia	Silpa Hanoatubun. (2020)	<p>Hasil analisis menyimpulkan bahwa, betul intervensi kuat untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah dibandingkan skenario minimal <i>intervension</i>. Akan tetapi, kesimpulan ini hanya bebas variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, yang tentunya, bukan satu-satunya faktor ekonomi penting dalam analisis ekonomi. Kedua, kesimpulan yang berbeda didapatkan dalam konteks jangka panjang, dimana justru pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat lebih tertekan kalau skenario yang</p>	<p>Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah: Persamaannya adalah variabel Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah variabel Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia.</p>
----	---	--------------------------	---	---

			terjadi adalah intervensi minimal. Dapat disimpulkan bahwa kerugian ekonomi dari strategi intervensi kuat ( <i>supression</i> ) jauh lebih rendah daripada kerugian ekonomi skenario intervensi minimal. dari mortalitas.	
5.	Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia	Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati. (2020)	Orientasi terhadap fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanakan tiga konsep kebijakan strategis yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi. Tiga kebijakan tersebut harus ditopang dengan formulasi dan strategi	Persamaannya adalah variabel Pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya adalah variabel Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi

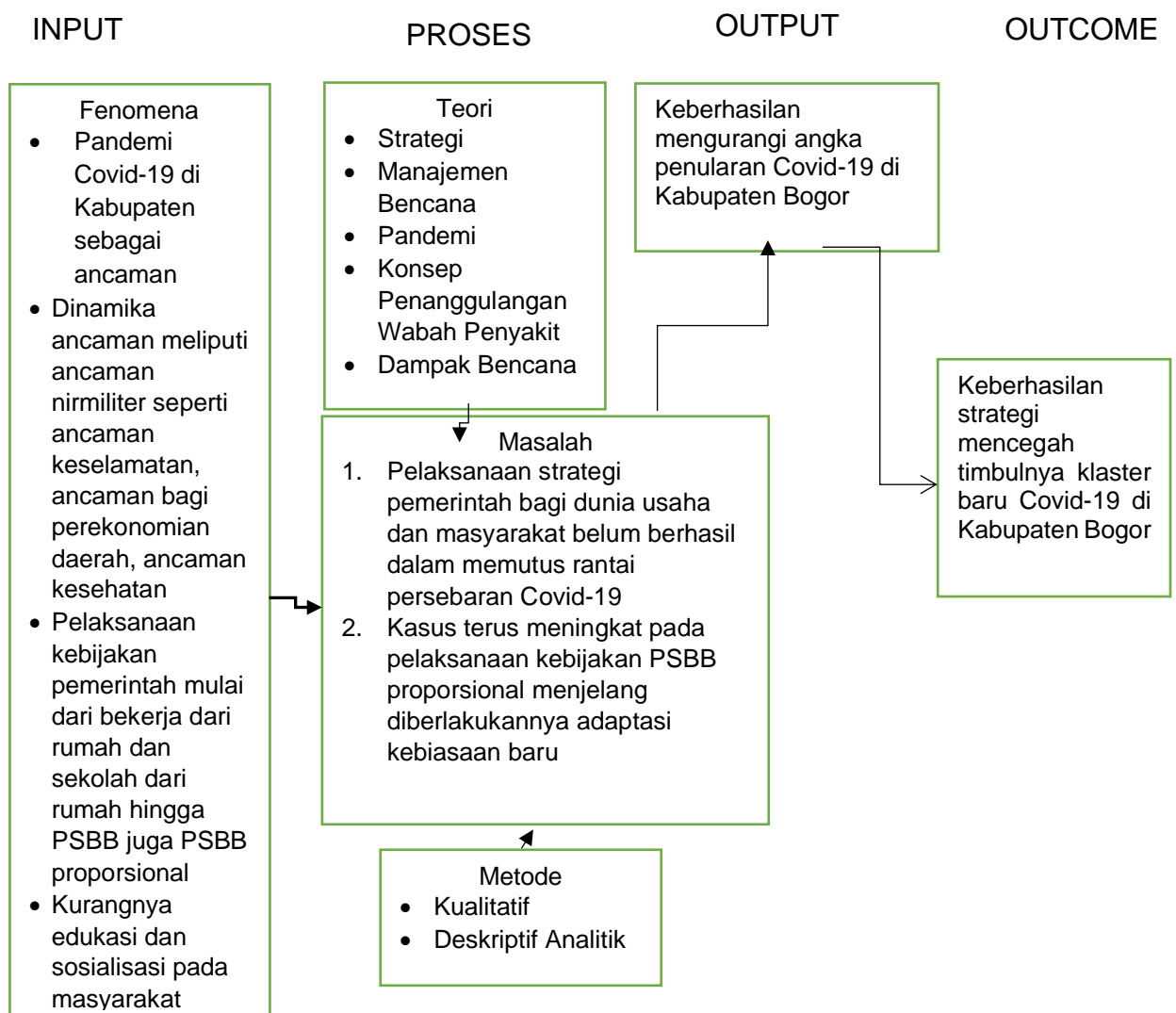
			<p>kongkrit yang sesuai dengan kondisi empirisnya. Pelatihan online tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di tengah pandemi ini, melainkan dengan implementasi kebijakan yang kongkrit melalui 3 konsep kebijakan tersebut.</p>	
--	--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh Penulis (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang didasarkan pada permasalahan pandemi Covid-19. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah untuk melihat penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dari perspektif keamanan nasional yang sebelumnya belum ada penelitian yang secara langsung menggunakan variabel tersebut dalam satu pengujian.

## 2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dalam perspektif keamanan nasional. Kerangka berpikir juga disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang disederhanakan dalam bentuk bagan sebagaimana digambarkan pada di bawah ini:



Gambar 2.2: Kerangka Berpikir  
Sumber : Peneliti (2020)

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi banyaknya responden atau obyek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki obyek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data. Beberapa

pendekatan penelitian dalam kualitatif adalah: studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan deskriptif analitik sebagai desain penelitian. Deskriptif analitik ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor pada tahun 2020.

Data deskriptif analitik dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai upaya itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dilengkapi dengan upaya yang lain, seperti observasi, dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya sebuah studi kasus secara faktual, akurat dan apa adanya, mengenai berbagai hal (*what, when, where, how, dan why*). (Andi Prastowo, 2011).

Prosedur penelitian kualitatif tidak mempunyai pola baku. Penelitian kualitatif mengumpulkan dan mencatat data secara terperinci dari berbagai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Pelaksanaan pengambilan data tersebut langsung dilakukan oleh peneliti sendiri dengan melakukan pengamatan dan langsung berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

## **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Peneliti memilih lokasi tersebut karena topik dari penelitian ini ialah mengenai penanggulangan bencana pandemi Covid-19, yang didalamnya terkait dengan lembaga pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dunia usaha dan masyarakat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Selain itu juga karena Kecamatan Cibinong merupakan salah satu zona merah di Kabupaten Bogor.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan, yaitu selama bulan Maret sampai dengan bulan November 2020.

Adapun rencana penelitian disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1: Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2020						
		Mar	Jun	Jul	Agt	Sep	Nov	Des
1	Studi pendahuluan							
2	Studi Kepustakaan							
3	Pengajuan Proposal Penelitian							
4	Seminar proposal							
5	Pengumpulan Data							
6	Pengolahan data							
7	Analisis data							
8	Penyusunan laporan Penelitian							
10	Pengumpulan Laporan Penelitian							
11	Seminar Hasil Penelitian							

Sumber : Diolah oleh penulis, 2020

### 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sesuatu, baik orang, komunitas ataupun lembaga (organisasi), yang akan diteliti. Dengan kata lain subyek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung obyek penelitian. Jika subyek penelitian adalah orang, maka peneliti menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai informan (narasumber) dalam penelitian. Banyaknya informan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data/informasi. Peneliti juga menjelaskan tentang obyek penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2014:13) menyebutkan bahwa pengertian obyek penelitian adalah sebagai berikut:

"Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)."

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:5) menyebutkan bahwa pengertian obyek penelitian adalah sebagai berikut:

"Obyek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar individu satu dengan lainnya. Dalam suatu penelitian, obyek penelitian dinamakan variabel penelitian."

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori keamanan nasional, teori manajemen bencana, teori pandemi, konsep penanggulangan wabah penyakit dan teori dampak bencana. Obyek dari penelitian ini adalah aspek yang berkaitan dengan penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor.

### 3.3.1 Subyek Penelitian

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:5) menyebutkan bahwa subyek penelitian dalam metode penelitian adalah unit analisis atau unit observasi yang akan diteliti.

Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Merupakan pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor;
- c. Merupakan pelaku dari dunia usaha di Kabupaten Bogor;
- d. Merupakan masyarakat di Kabupaten Bogor;
- e. Aktif di dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemilihan informan dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*, yaitu ditentukan agar selaras dengan tujuan studi. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informan yang demikian, menurut Moleong (2005) ialah dilakukan dengan:

- a. Melalui keterangan yang berwenang, baik secara formal seperti instansi pemerintah, maupun informal seperti tokoh masyarakat.
- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian ini mengelompokkan lembaga/instansi berdasarkan posisi dan peran. Informan dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.

- a. BPBD Kab. Bogor (Jabatan: Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kab. Bogor)
- b. Dinas Kesehatan Kab. Bogor (Jabatan: Kepala Seksi Suveilans dan Imunitas Dinas Kesehatan Kab. Bogor)
- c. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Bogor (Jabatan: Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Bogor)

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor (Jabatan: Pelaksana/Pengawas Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor)
- e. UMKM Seblak Raja Seuhah (Jabatan: Pemilik UMKM)
- f. UMKM Dapur Mama Arya (Jabatan: Pemilik UMKM)
- g. Masyarakat Kab. Bogor di Kecamatan Cibinong dan sekitarnya (Jabatan: Mahasiswa dan PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor)

Dari persyaratan mengenai informan, kemudian peneliti mengklasifikasikan informan dalam tiga kategori informan (Sugiyono, 2005), antara lain:

- a. **Informan kunci**, yaitu informan yang ‘membukakan pintu’ untuk diarahkan kepada informan utama. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak dari instansi terkait yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor; yaitu: BPBD Kab. Bogor, Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Gugus Tugas Covid-19 Kab. Bogor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor.
- b. **Informan utama**, yaitu informan yang mengetahui dan dapat menjelaskan secara rinci terhadap studi kasus yang diteliti serta terlibat secara penuh dalam studi kasus tersebut. Informan utama juga berfungsi untuk menemukan akses terhadap sumber-sumber bukti penelitian lainnya. Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku dunia usaha terkait yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor; yaitu: UMKM Seblak Raja Seuhah, dan UMKM Dapur Mama Arya.
- c. **Informan pendukung**, yakni informan yang mengetahui dan terlibat langsung, namun tidak secara penuh terlibat dalam fenomena yang diteliti. Informan tidak langsung ini untuk mengklarifikasi sumber-sumber lainnya. Informan pendukung ini adalah masyarakat yang

terkait dalam penanggulangan bencana wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor, yaitu: Masyarakat Kab. Bogor di Kecamatan Cibinong dan sekitarnya (PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Mahasiswa).

### **3.3.2 Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti mengenai penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dari perspektif keamanan nasional. Adapun penelitian ini meliputi pelaksanaan kebijakan, strategi, implementasi serta dampaknya bagi dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Bogor sebagai upaya Pemerintah dalam memutus persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu metode riset dengan melakukan kegiatan wawancara tatap muka. Wawancara merupakan instrumen penelitian yang sangat fleksibel karena tidak membutuhkan banyak ruang dan waktunya dapat disesuaikan sesuai keb. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara untuk mendapat informasi verbal secara langsung dan detail dari informan yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor
- b. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2007), suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang akan dipakai adalah berupa laporan, baik dengan BPBD, Dinas Kesehatan Kab. Bogor, Gugus Tugas Covid-19 Kab. Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bogor, UMKM serta masyarakat Kab. Bogor.

- c. Observasi, yaitu ruang peneliti untuk dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku objek penelitian. Observasi juga merupakan salah satu upaya peneliti untuk dapat memahami lebih dalam mengenai studi kasus yang sedang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini meninjau langsung penanggulangan bencana wabah pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Adapun alat pengumpul data atau instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Pedoman wawancara (terlampir)
- b. Perekam suara
- c. Catatan lapangan
- d. Kamera
- e. Alat tulis dan buku

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

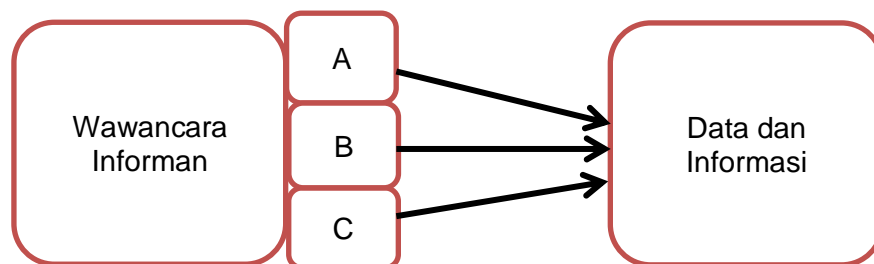
Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data (Mudjia Rahardjo, 2010). Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data atau metode, dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan dilakukannya wawancara kepada informan yang berbeda, kemudian hasil wawancara akan menjadi bahan pembeda dengan sumber-sumber informasi lain yang diterima oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan

melakukan perbandingan dan mengambil kesimpulan dari setiap sumber informasi ketika pengumpulan data dilakukan dan peneliti akan membuat kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

Triangulasi teknik pengumpulan data atau metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan dilakukannya beberapa teknik pengumpulan data, yang kemudian akan dikolaborasikan dan diselaraskan agar menjadi kesatuan informasi dan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.

Triangulasi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dengan dilakukannya perbandingan antara teori yang terkait dengan penelitian ini dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan selama masa penelitian oleh peneliti. Sehingga terlihat dengan jelas bagaimana perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan derajat kepercayaan yang dimiliki oleh data adalah tinggi.



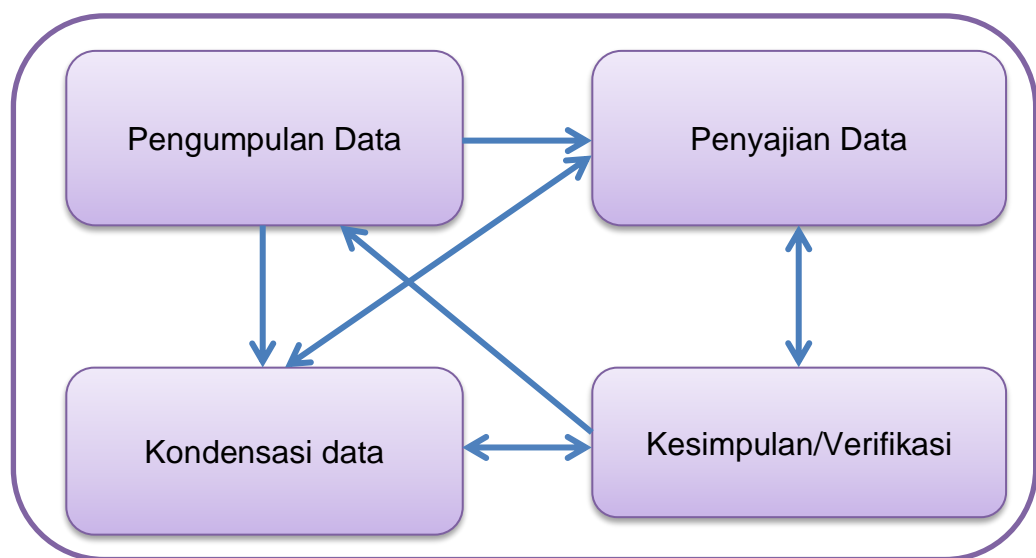
Gambar 3.1: Skema Triangulasi Sumber  
Sumber: Peneliti (2020)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



**Gambar 3.2.** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

**Sumber:** Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data penelitian yang dikumpulkan berupa teks, gambar, suara, maupun foto yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama masa penelitian. Perolehan berbagai macam kemudian diolah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi digunakan untuk mengurangi bias yang terdapat dalam hasil pengumpulan data.

#### b. Kondensasi Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dikondensasi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah.

Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

#### d. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Sebelum peneliti menjelaskan analisis dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal, yaitu profil Pemerintah Kab. Bogor, sebagai obyek penelitian agar hasil pengamatan dan studi dokumentasi terhadap obyek yang diteliti dapat tergambar lebih jelas.

##### **4.1.1. Profil Pemerintah Kab. Bogor**

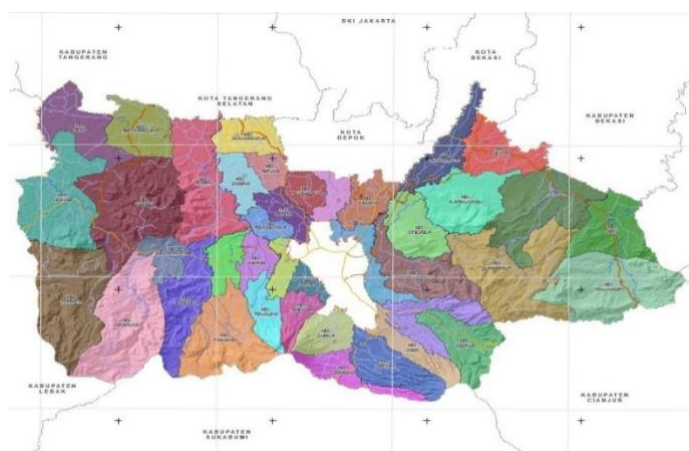
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 saat ini wilayah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.

Saat ini populasi penduduk di Kabupaten Bogor mencapai hampir 5.000.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, membuat Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Sejak masa Orde Baru banyak pendatang yang memilih Kabupaten Bogor karena lokasinya yang tak jauh dari Jakarta kebanyakan pendatang dari Suku Jawa, bahkan di Kecamatan Cibinong populasi orang Jawa mencapai 32% dan di Kecamatan Gunung Putri 30%. Sementara di Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tanjungsari populasi orang Jawa dibawah 3%.

Kabupaten Bogor dilintasi Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol ini adalah jalur wisata utama dari Jakarta menuju Bandung. Jalur ini melewati rute Jalan Tol Jagorawi-Puncak-Cianjur-Bandung. Jalur Ciawi-Puncak merupakan salah satu yang terpadat pada musim libur, karena

kawasan tersebut merupakan tempat berlibur warga Jakarta dan sekitarnya. Apabila jalur wisata utama tersebut macet, yang biasanya terjadi pada hari-hari libur, maka dapat menggunakan rute alternatif melewati Cibubur - Cileungsi - Jonggol - Cariu - Cianjur - Bandung. Objek Wisata: Jungle Fest, Puncak, Taman Safari, Gunung Salak Endah, Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Sirkuit Sentul, Stadion Pakansari, Hutan Pinus Catang Malang, Taman Wisata Air Panas Ciseeng, Penangkaran Rusa Cariu, The Jungle Land Bogor, Pemandian Air Panas Gunung Pancar, Bukit Pelangi, Pasar Ah Poong, Sentul Paradise Park, Taman Wisata Mekarsari, Taman Wisata Matahari, Curug Cilember, Water Kingdom Cileungsi, Kampong Soenda Siliwangi

Untuk angkutan kereta api, terdapat jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Jakarta-Bogor yang jalur kereta apinya berlanjut hingga ke Stasiun Sukabumi, dan Stasiun Cianjur dengan menggunakan Kereta Rel Diesel (KRD). Dan jalur akhir berhenti di Stasiun Padalarang. Stasiun Kereta Api Aktif: Stasiun Cilebut, Stasiun Bojong Gede, Stasiun Nambo, Stasiun Cibinong, Stasiun Cilejit, Stasiun Tenjo, Stasiun Parung Panjang, Stasiun Cigombong, dan Stasiun Maseng. Stasiun Kereta Api Non Aktif: Stasiun Gunung Putri, dan Stasiun Pondok Rajeg.



Gambar 4.1: Wilayah Kabupaten Bogor  
Sumber: Situs Resmi Kab. Bogor

#### **4.1.1.1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor**

Pada tahun 1955, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor berdiri dengan nama Komando Pemberantasan Malaria (KOPEM) yang kemudian berubah nama menjadi Kantor Dokter Kabupaten (DOKABU). Di tahun 1966 nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor digunakan sampai sekarang. Di lokasi yang sama pada tahun 1986 didirikan kantor Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bogor. Fungsi dari Kantor Departemen Kesehatan lebih dititik beratkan terhadap pembinaan tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Sebelumnya fungsi tersebut dilakukan oleh Kantor Departemen Kesehatan Wilayah Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Fungsi-fungsi lain pada Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kota hampir sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kecuali Kewenangan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perizinan Klinik, Rumah Bersalin dan Apotek bagi tenaga Medis, Paramedis, dan Apoteker. Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah mengakibatkan Kantor Departemen Kabupaten/Kota ditiadakan. Tugas dan Fungsi Kantor Departemen dialihkan seluruhnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berikut anggaran belanja pegawainya yang diberikan kepada pemerintah Daerah.

#### **4.1.1.2. BPBD Kabupaten Bogor**

Berdasarkan Pasal 18 hingga Pasal 25 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedangkan petunjuk pelaksanaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kabupaten Bogor mengimplementasikan dasar dimaksud dalam bentuk Perda Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2010.

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 11 Januari 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mulai beroperasi berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor. Badan ini langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Badan dan secara teknis dipimpin oleh Kepala Pelaksana.

Pada Tahun 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2015 Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2010 Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor yang ditandai dengan hilangnya kata Pemadam Kebakaran dari Seksi Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, namun tidak menghilangkan tugas dan fungsi dari pemadam kebakaran.

#### **4.1.1.3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor diberi kewenangan pengelolaan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor

Adapun tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan, sebagai berikut:

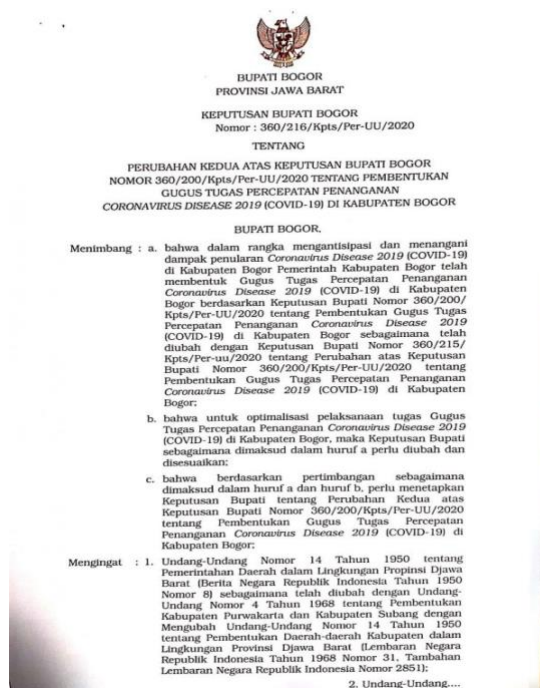
1. Perumusan kebijakan bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

#### **4.1.1.4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor**

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Gugus Tugas Covid-19 dibentuk lewat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Pelaksana gugus tugas diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, sementara wakil ketua pelaksana sebagai Asisten Operasi Militer Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri. Gugus tugas ini berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah di daerah. Gugus tugas ini dibentuk tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-uu/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di

Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 360/215/Kpts/Per-uu/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 360/200/Kpts/Per-uu/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor.



Gambar 4.2: SK Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Kab.Bogor  
Sumber: Situs Resmi KPCPEN

## 4.2. Hasil Penelitian

Data yang dipaparkan dalam hasil penelitian ini merupakan data primer, yang didapat melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, maupun data sekunder yang didapatkan dari dokumen maupun sumber tambahan yang digunakan sebagai pendukung dari hasil wawancara, sehingga data yang dimiliki dapat dianalisis dan disesuaikan antara tujuan, kriteria, dan data empiris terkait penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor.

#### **4.2.1 Strategi, dan Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor**

Persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor telah terjadi sebelum adanya pengumuman terkait dengan kasus 01 dan 02 oleh Pemerintah yang dalam hal ini ialah Presiden, tepatnya telah terlacak sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) pada tanggal 29 Februari 2020. Sejak saat itu, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan pemantauan dan pengetatan terhadap masyarakat yang memasuki wilayah Kabupaten Bogor dengan memperhatikan riwayat perjalanannya. Namun seiring berjalannya waktu, persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor semakin meluas dan kasus terkonfirmasi juga semakin banyak. Terdapat kendala-kendala yang membuat Covid-19 belum dapat diberhentikan penyebarannya, beberapa yang utama ialah kesadaran dan kedisiplinan masyarakat mengenai nyatanya Covid-19 yang menyebar secara masif di lingkungan masyarakat Kabupaten Bogor. Sikap acuh dan tak patuh masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor akan terus membuat kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Bogor terus meningkat dan angka penularan tidak dapat diturunkan.

Kesadaran dan kedisiplinan merupakan hal utama yang mendasar yang dapat dan harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Namun, hal utama dan mendasar tersebut masih belum dimiliki oleh sebagian masyarakat Kabupaten Bogor yang terus saja tidak mengindahkan imbauan dari pemerintah maupun sukarelawan Covid-19, sehingga penanganan juga terus dilakukan kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, terlebih kepada mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun merupakan OTG atau orang tanpa gejala.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, diketahui bahwa masa awal pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor sebenarnya dimulai sejak tanggal 29 Februari 2020 dengan ditemukannya kasus sebagai Pasien Dalam Pengawasan, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Awal pandemi, 29 Februari 2020. PDP di Kabupaten Bogor. Kita melakukan pengetatan untuk riwayat perjalanan, terutama yang dari China. Perjalanan yang dikarantina di Natuna salah satunya ada orang Kabupaten Bogor. Jadi kebijakan khususnya kita melakukan pembatasan perjalanan, info dari pusat ke daerah, juga melakukan *tracing* ke RS dan melakukan pemantauan.” (Wawancara dengan AM, 16 November 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa, setelah ditemukannya PDP, dilakukan pengetatan terhadap riwayat perjalanan, terlebih yang berasal dari China dimana Covid-19 telah merebak secara masif. Secara kebetulan, PDP pertama di Kabupaten Bogor memiliki riwayat perjalanan dari China. Dengan adanya temuan tersebut *tracing* terhadap warga Kabupaten Bogor terus dilakukan. Kemudian diketahui bahwa di antara WNI yang dikarantina di Natuna juga terdapat warga Kabupaten Bogor. Dengan adanya faktor-faktor tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan khusus mengenai pembatasan perjalanan. Dengan banyaknya informasi terkait dengan Covid-19 yang menjadi pandemi di Indonesia, agar tidak terjadi kesalahan informasi yang memicu kesalahan persepsi, maka segala bentuk informasi terkait Covid-19 segera diteruskan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, kemudian dilakukan *tracing* ke rumah sakit sebagai langkah pemantauan.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor terkait dengan pandemi Covid-19 tidak hanya mengenai aspek kesehatan dan keselamatan, tetapi juga aspek ekonomi pada sektor perindustrian. Dimana dunia industri di Kabupaten Bogor cukup besar dengan begitu banyaknya

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar untuk mengkondisikan banyaknya perusahaan dalam bidang industri di Kabupaten Bogor. Pemerintah menetapkan kebijakan kepada para pelaku industri untuk melakukan pelaporan pada setiap pekan. Industri yang melakukan pelaporan akan ditracing seperti yang dilakukan di wilayah Sentul dan Cibinong, kemudian dilakukan pemeriksaan kontak erat dengan industri terkait. Kontak erat yang dilakukan dengan *swab test*, isolasi mandiri sampai hasil tes keluar, sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

“Seiring berjalannya waktu, kita tetap ada yang namanya pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang termasuk tupoksi perindustrian ya, dalam hal ini kita bicaranya industri kecil kalau kita. Jadi ada pembinaan sertifikasi halal, pada pembinaan sertifikasi merk, ada pembinaan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan. Ada pembinaan yang namanya latihan pernapasan, seperti itu. Itu yang paling sering ada masalah mesin peralatan seperti itu. Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum adanya Covid, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Dengan adanya Covid di bulan Maret ya kita melakukan PSBB kan awal maret ya? Nah pas kebetulan PSBB yang pertama itu, jadi gini semua semua dana kegiatan yang saya sebutkan ya buat kegiatan-kegiatan dinas, pertama kan kalau kita kan kalau kalau kita industri kecil, kalau kita kalau kita nilai perusahaan industri menengah mah kan kita nggak usah kasih udah nggak usah difasilitasi kan mampu berdiri sendiri kok. Untuk hal ini ya, manajemennya udah bagus dan lain lain lah. Nah semua dana itu dialihkan ke penanganan Covid. Dana-dana buat pembinaan itu mba.” (Wawancara dengan HH, 29 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa bagi yang memiliki hasil tes dan dinyatakan negatif akan kembali diperbolehkan bekerja, sedangkan bagi yang hasil tes diketahui positif akan dilaksanakan tata laksana lanjutan seperti diarahkan ke Rumah Sakit khusus isolasi yang berada di Kecamatan Kemang, atau Rumah Sakit lainnya yang merupakan Rumah Sakit rujukan Covid-19. Dapat juga dengan melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Dengan ditemukannya kasus positif 01 dan 02 di Depok pada bulan Maret 2020 yang kemudian masuk ke Kabupaten Bogor, Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan yang semakin banyak, juga dengan perlakuan masyarakat terhadap mereka yang terkonfirmasi Covid-19. Antisipasi harus dilakukan karena Kabupaten Bogor sangat dekat dengan Jakarta yang merupakan episentrum dari Covid-19. Dengan adanya rumah sakit pusat isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang, pada bulan Maret 2020 serentak dilakukan evaluasi Rumah Sakit, dimana Rumah Sakit di Kabupaten Bogor diharuskan menyiapkan ruangan isolasi untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Bahkan rumah sakit sempat mengalami *overload*, yaitu terlalu banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat, banyak juga yang dinyatakan positif Covid-19 namun merupakan OTG (Orang Tanpa Gejala). Dengan semakin banyaknya OTG, maka diputuskan bahwa rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang difokuskan untuk mereka yang merupakan dinyatakan sebagai OTG. Sedangkan rumah sakit rujukan Covid-19 lainnya difokuskan untuk mereka yang terkonfirmasi positif dengan gejala.

Untuk mendapatkan kamar di rumah sakit pusat isolasi di Kemang memang relatif lebih rumit prosedurnya. Harus memiliki hasil tes laboratorium, dan hasil *rontgen*. Sedangkan mereka yang datang dengan gejala maka akan langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan Covid-19 lainnya. Rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang menggunakan alat penyaring udara, sehingga udara akan langsung tersaring dan terhisap oleh alat penyaring udara. Dengan banyaknya pasien masuk yang bahkan melebihi kapasitas, maka rumah sakit pusat isolasi memprioritaskan untuk mereka yang telah terkonfirmasi positif. Sedangkan untuk yang lainnya dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk suspek, isolasi, atau juga perawatan bagi OTG banyak yang dilakukan di rumah karena tidak tertampung di rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang.

Permasalahan yang muncul dari terjadinya pandemi Covid-19 ialah aspek ekonomi, namun hal tersebut merupakan aspek di luar kesehatan.

Pada bulan April hingga bulan Mei 2020, dilakukan survei pada pasar besar di delapan titik di Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Cileungsi, Cibinong, Jonggol, Ciawi, Parung Panjang, Cigudeg, Jasinga, dan Cisarua dengan dilakukannya *swab test*, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Yang jelas April-Mei survei pasar besar, 8 titik di swab. Ada pasar dengan kasus cluster, yaitu pasar Cileungsi. Swab pertama banyak ditemukan positif, tracing ulang, swab lagi, lebih banyak yang dinyatakan positif. Kemudian pasar ditutup, didesinfektan, yang positif di isolasi. Sampai petugas dikurung oleh demonstran. Perawat tetap melakukan tracing, karantina, desinfektan, tutup, baru pasar dibuka kembali. Untuk industri kita lokalisir bagian. Siapkan swab, desinfektan, yang positif diisolasi mandiri yang negatif masuk kembali bekerja. 8 pasar besar yang dilakukan titik swab : Cileungsi, Cibinong, Jonggol, Ciawi, Parung panjang, Cigudeg, Jasinga, dan Cisarua.” (Wawancara dengan AM, 16 November 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa ada pasar yang merupakan *cluster* dengan kasus positif. *Cluster* yang ditutup ialah pasar Cileungsi. *Swab test* pertama banyak ditemukan kasus positif. Setelah didapatkan hasil, segera dilakukan *tracing* kembali. Setelah dilakukan *swab test* kedua, hasilnya ditemukan lebih banyak lagi kasus positif. Dengan hasil tersebut, pasar Cileungsi ditutup, dilakukan penyemprotan dengan disinfektan, mereka yang terkonfirmasi positif diharuskan melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian dilakukan *swab test* ketiga. Setelah dilakukan ketiga *swab test* dilaksanakan kebijakan untuk perkuat *tracing*, melakukan karantina, penyemprotan disinfektan, pasar ditutup, kemudian dibuka kembali dan begitu seterusnya.



Gambar 4.3: Pasar Cileungsi Klaster COVID-19  
Sumber: Dokumentasi Penulis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor merupakan lembaga yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor untuk menanggulangi permasalahan kebencanaan di Kabupaten Bogor. BPBD Kabupaten Bogor juga merupakan instansi terkait dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. BPBD yang biasanya menjadi tumpuan dalam penanganan kebencanaan, dalam bencana pandemi Covid-19 BPBD juga tetap terlibat, meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan BPBD tidak terlibat langsung untuk menangani kasus-kasus positif yang terkonfirmasi melainkan lebih fokus untuk meminimalisir persebaran Covid-19 di masyarakat dengan melaksanakan kegiatan seperti pembagian masker kepada masyarakat, dengan adanya penyemprotan disinfektan dan antiseptik, mengirimkan bantuan air bersih untuk rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang, dan mengirimkan bantuan logistik Covid-19 untuk Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bogor, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Ketika Presiden mengumumkan hal tersebut, berdasar dengan arahan Pemerintah Daerah dengan peraturannya, BPBD segera terjun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor. Tidak lupa juga BPBD membagikan masker yang dilakukan sejak bulan April hingga bulan Oktober masih terus berlangsung dan telah terbagikan ratusan ribu masker untuk masyarakat.”  
Wawancara dengan MAH, 5 Oktober 2020

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah dilakukan selama sembilan bulan dimulai pada Maret 2020 dan masih tetap berlangsung hingga bulan Desember 2020. Prioritas kegiatan dilaksanakan pada kecamatan-kecamatan yang merupakan zona merah di Kabupaten Bogor. meskipun demikian, kecamatan-kecamatan yang bukan merupakan zona merah juga akan mendapat perhatian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

a. Pembagian Masker kepada Masyarakat

Kegiatan pembagian masker telah dilaksanakan secara berkala di wilayah Kabupaten Bogor. Ratusan ribu masker telah diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pembagian masker kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang didalamnya terdapat sinergi antarinstansi di lingkungan Kabupaten Bogor. Karena dalam kegiatan tersebut, personel yang terlibat mencakup dari Satpol Pamong Praja, Kepolisian, juga Kodim 0621. BPBD dalam kegiatan pembagian masker berperan sebagai penyuplai dan penyalur. Kegiatan pembagian masker untuk masyarakat juga merupakan bentuk penertiban dengan dilaksanakan inspeksi dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui personel yang terlibat. Dimana masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan untuk memakai masker demi kesehatan keselamatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Pembagian masker ada yang dilaksanakan dengan memberikan suplai kepada Kecamatan-Kecamatan yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakatnya melalui kantor Kecamatan maupun Puskesmas. Seperti yang diberikan kepada Kecamatan Tajurhalang, Gunung Sindur, dan Leuwisadeng. Di Kecamatan Tajurhalang diberikan sejumlah 500 buah masker melalui Kantor Kecamatan dan 500 buah masker melalui puskesmas. Di Kecamatan Gunung Sindur dan Leuwisadeng diberikan 500 buah masker melalui Kantor Kecamatan dan 1000 buah masker melalui dua puskesmas, dengan masing-masing puskesmas sebanyak 500 buah

masker. Sedangkan pembagian masker yang dilakukan dengan penyelenggaraan penertiban dengan bantuan dari aparat ialah pembagian masker secara personal kepada masyarakat yang kepadatan tidak menggunakan masker di wilayah yang dilakukan penertiban atau inspeksi. Inspeksi atau penertiban dengan memberikan masker secara individu kepada masyarakat telah dilakukan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk terus membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami bahwa pandemi Covid-19 nyata adanya.



Gambar 4.4: Penertiban di Kecamatan Cibinong  
Sumber: Dokumentasi Penulis

b. Penyemprotan Disinfektan dan Antiseptik

Penyemprotan disinfektan dan antiseptik dilaksanakan dengan penyemprotan jalan sebagai fasilitas umum dan di lingkungan masyarakat dari desa ke desa dan seterusnya. Penyemprotan disinfektan dan antiseptik juga dilaksanakan pada instansi pemerintahan Kabupaten Bogor. Penyemprotan disinfektan dan antiseptik bukan merupakan upaya yang efektif untuk menghentikan persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor, namun setidaknya merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk membantu masyarakat dalam mengurangi kekhawatiran, juga sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat. Penyemprotan disinfektan dan antiseptik diawali dengan melakukan

penyemprotan di Kantor BPBD Kabupaten Bogor oleh petugas dari PMI Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2020 sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 25 Maret 2020, Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor memulai melakukan penyemprotan disinfektan dan antiseptik di lingkungan Pasar Cibinong, Setu Cikaret, Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bogor, Terminal Cibinong, juga rumah-rumah warga di Kecamatan Cibinong. Kegiatan penyemprotan disinfektan dan antiseptik oleh Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor terus dilakukan secara rutin dilakukan hampir setiap hari dengan lokasi yang berbeda-beda melingkupi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2020 terhitung sudah lebih dari 100 kali dilakukan di 25 Kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Sukaraja, Citeureup, Ciawi, Babakan Madang, Rumpin, Leuwiliang, Parung Panjang, Ciseeng, Ciomas, Cisarua, Dramaga, Jonggol, Jasinga, Tamansari, Tanjungsari, Gunung Sindur, Klapanunggal, Cileungsi, Gunung Putri, Sukajaya dan Sukamakmur. Penyemprotan disinfektan dan antiseptik juga dilakukan di Kantor Bupati Bogor serta Kantor DPRD Kabupaten Bogor. Untuk lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dilakukan penyemprotan disinfektan dan antiseptik secara berulang kali sebagai bentuk upaya untuk menimalisir penyebaran Covid-19, karena lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang mengurus segala kebutuhan masyarakat terkait dengan adanya bantuan-bantuan bagi masyarakat selama masa pandemi Covid-19, baik bantuan dalam bentuk fasilitasi maupun bantuan dalam bentuk logistik dan lain sebagainya.

c. Pengiriman Air Bersih ke Rumah Sakit Pusat Isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang

Pada tanggal 11 September 2020, Tim TRC BPBD Kabupaten Bogor mengirimkan air bersih ke rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor. Air bersih yang dikirimkan sebanyak 5000 liter. Air bersih yang dikirimkan untuk rumah sakit pusat isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang berasal dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Pengiriman air bersih yang dilakukan disebabkan oleh adanya kerusakan pada mesin pompa air khusus untuk kebutuhan IGD, sehingga harus segera diberikan bantuan air bersih agar tidak menimbulkan permasalahan kemudian dilihat dengan masih banyaknya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit pusat isolasi COVID-19 ini sehingga apapun bentuk permasalahan yang muncul harus segera dapat diatasi agar tidak memunculkan permasalahan lainnya yang dapat berkembang.

d. Pengiriman Bantuan Logistik COVID-19 untuk Kecamatan di Kabupaten Bogor

BPBD Kabupaten Bogor bersama dengan tim gabungan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor melakukan pengiriman bantuan logistik COVID-19 ke Kecamatan Dramaga pada tanggal 10 September 2020. Pemberian bantuan logistik merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak kepada banyak masyarakat Kabupaten Bogor. Pengiriman logistik COVID-19 berupa beras sebanyak 1.311 karung untuk tiga desa yang berada di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, kemudian dilanjutkan ke dua desa yang juga ada di Kecamatan Dramaga. Pendistribusian dan penerimaan bantuan logistik COVID-19 tersebut dibantu oleh staf desa setempat.

Adapun rincian bantuan logistik yang diberikan di tiga desa di tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Tabel Bantuan Logistik Covid-19

No.	Nama Desa	Jenis Bantuan	Total
1.	Cikarawang	662 karung beras	9.930 kg
2.	Neglasari	334 karung beras	5.010 kg
3.	Purwasari	315 karung beras	4.725 kg
4.	Sinarsari	332 karung beras	4.980 kg
5.	Sukawening	343 karung beras	5.145 kg



Gambar 4.5: Pemberian Bantuan Logistik Covid-19 di Kecamatan Dramaga  
Sumber: BPBD Kab. Bogor

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu dinas terkait dalam penanganan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditugaskan untuk melaksanakan

pengawasan secara berkala dan rutin kepada perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Bogor. Pengawasan yang dilakukan selama masa pandemi ialah agar setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor dapat melaksanakan protokol kesehatan secara benar dan tepat. Selain itu juga, setiap perusahaan harus melaporkan perkembangan kondisi kesehatan para pekerjanya kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai upaya pemutusan rantai persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Pendataan juga dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan perusahaan yang memiliki kasus terkonfirmasi positif Covid-19 maupun tidak. Penegasan juga selalu dilakukan ketika pelaksanaan pengawasan ke setiap perusahaan, meskipun beberapa perusahaan tidak menerima secara baik ketika dilakukan pengawasan meskipun tidak ada yang pernah melakukan penolakan atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Pengawasan yang dilakukan juga selalu diakhiri dengan evaluasi kepada masing-masing perusahaan apabila terdapat protokol kesehatan yang tidak dijalankan atau yang dijalankan namun dengan tidak semestinya, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Perusahaan-perusahaan itu sendiri pasti ada perusahaan yang mematuhi kebijakan ada. Kalau bagus itu bagaimana penyalakannya dari kesehatan biasanya atau keputusan kesehatan kita lihat dulu aturannya kesehatan ya itu ya sama-sama sama mereka hal-hal yang tidak mereka laksanakan apapun mereka laksanakan dulu juga begitu kita ke sana kita ngasih surat apa namanya bawa in ya pembawaan ya supaya misalnya mereka belum manfaati, manfaati kapasitas 50% misalnya di ruang kantor di ruang kerucut terus jaga jarak satu setengah meter nanti langsung pada saat itu juga pada saat kita akan tuh pada saat kita akan tuh tuh gitu lanjutnya selanjutnya. Setiap perusahaan sudah makan nih mereka datang ke kami misalnya dari pas kita ke lapangan itu ada temuan tuh mereka tidak jaga jarak Juara ketiga tidak jaga jarak jaga jarak jarak dari pelaksanaannya kita kasih apa namanya dan dua hari tiga hari itu mereka udah kita laporan laporan terbaru jadi pokoknya dia mampir kantor lampirkan laporan mingguan ya mbak dapat izin operasional ya operasional dan izin operasional operasional kegiatan industri pakai mobilitas kegiatan itu kegiatan industri dia dapat dari Kementerian ESDM ya tetap menjalankan operasionalnya trnya keluhkan oleh oleh Bupati Bogor kota Bogor yang kayak gini atau sejenis sanksi atau

bawa bahwa dari 8 sektor yang di dikecualikan itu nggak bisa.” (Wawancara dengan HH, 29 September 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa pengawasan dilakukan sebanyak satu hingga dua kali dalam satu pekan. Sehingga pelaporan kondisi perusahaan juga selalu diperbarui setiap pekan sebagai upaya untuk meminimalisir persebaran Covid-19 di perusahaan. Adapula perusahaan yang ditutup sementara waktu setelah terkonfirmasi adanya kasus positif Covid-19 di perusahaan tersebut. Perusahaan yang ditutup sementara waktu setelah terkonfirmasi adanya kasus positif Covid-19 merupakan perusahaan yang dinilai tidak mengindahkan imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik dan tepat sehingga memungkinkan persebaran Covid-19 secara masif di perusahaan tersebut bagi para pekerjanya.

Kebijakan, strategi dan implementasi sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran Covid-19 ke Kabupaten Bogor sudah dilakukan oleh BPBD, karena tupoksi sebagai bagian dari pemerintah yang memiliki agenda kegiatannya dan memiliki anggarannya, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Sudah dilakukan oleh BPBD, karena tupoksi sebagai bagian dari pemerintah. Ada rencana kegiatannya dan ada juga anggarannya. Tidak hanya BPBD, ada dinas lain yang punya tugas bersinggungan seperti Dinas Pemadam Kebakaran.” (Wawancara dengan E, 17 November 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa tidak hanya BPBD, ada instansi lain yang juga memiliki tugas bersinggungan seperti Dinas Pemadam Kebakaran. Di Kabupaten Bogor dibentuk Gugus

Tugas yang bekerja bersama perangkat daerah dan juga adanya anggaran yang diubah dengan dialokasikan untuk Covid-19 karena Covid-19 merupakan masalah bagi dunia sehingga harus dilawan bersama. Terkait dengan protokol kesehatan ada penertiban. Gugus Tugas ada di setiap kecamatan dan desa. Gugus Tugas merupakan pekerjaan yang bertingkat. Penertiban dilakukan dengan adanya pelaksanaan inspeksi, sosialisasi. Jika ada yang tertangkap tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan terkena denda. Hal tersebut dapat dilakukan karena sudah diberikannya Surat Edaran untuk WFH. Gugus Tugas dari kecamatan akan ke perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga. Terdapat bantuan bantuan dan pengalihan anggaran. Ada bansos untuk masyarakat berupa 30 kg beras untuk masing-masing keluarga. Dalam pendistribusiannya dibantu oleh polisi dan tentara. Bantuan sosial ada dalam beberapa pos, seperti bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan bantuan khusus yang totalnya ada sekitar lima hingga enam pintu bantuan untuk masyarakat. Sosialisasi terus dilakukan, aturan disesuaikan dengan kondisi saat ini sampai tanggal 27 November 2020. Selanjutnya memantau kondisi. Lihat kondisi dari wilayah Jabodetabek. Ada kebijakan tempat wisata, pengendalian mobilisasi wisatawan. Rapid test dilakukan di 4 titik. Kalau reaktif disuruh pulang. Tempat wisata juga diarahkan untuk regulasi lain, kolam renang belum dibuka kecuali yang terdapat di dalam hotel. Perhatian pada hal hal tertentu tetap menjadi prioritas.

Aturan perpanjangan kesatu PSBB, pernikahan dibolehkan, dengan protokol kesehatan, lapor pada satgas, perusaahn buat latihan 50% kapasitas ruangan, maksimal 150 orang. Tracking peserta, rapid test, strategi pemulihan. Banyak bantuan untuk masyarakat yang terkena PHK, bantuan dari Pusat juga disediakan. Bantuan untuk wisata seperti hotel, membayar pajak izin mendirikan bangunan. Dengan seluruh bantuan yang telah disiapkan dan telah disediakan, menunjukkan bahwa Pemerintah tidak mengabaikan masyarakat. Masker dibuat oleh Dinas UMKM, karena Covid-

19 pemasukan pelaku UMKM berkurang, juga anggaran dialihkan, ada bantuan CSR, dari APBD. Tenaga kesehatan di puskesmas yang banyak terbesar di seluruh Kabupaten Bogor, cepat untuk melakukan *tracking tracing*. Pelaksanaannya berjenjang dari desa hingga ke Kabupaten. Ada rumah sakit pusat isolasi di Kecamatan Kemang, ada juga rumah sakit lapangan. Kebutuhan alat *rapid* dibantu penyediaannya oleh BIN. Banyak bantuan untuk pelaksanaan *swab test* juga, APB Pusat, Provinsi, CSR, swasembada dari PNS Kabupaten untuk tenaga kesehatan. *Monitoring* dan evaluasi terus dilakukan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibantu oleh personel dari Satol PP, Satgas di Kecamatan, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas lainnya yang terkait. Selalu ada rapat evaluasi di sekretariat satgas Covid-19. Evaluasi rutin dilakukan, terutama untuk perpanjangan aturan, disesuaikan dengan aturan kondisi pusat.

#### **4.2.2. Dampak Implementasi Covid-19 di Kabupaten Bogor**

Berdasarkan hasil penelitian Yamali dan Putri (2020), diketahui bahwa berbagai macam kebijakan telah dibuat dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 yang sedang masif terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positif namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi di Indonesia akibat dari pandemi ini antara lain terjadinya PHK. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Bogor, dimana dampak ekonomi jadi pertimbangan Bupati Bogor untuk tidak menerapkan jam malam. Seperti diketahui, jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten dan Kota Bogor bertambah, oleh karena itu beberapa daerah tetangganya menerapkan jam malam guna menurunkan kembali penambahan kasus Covid-19. Alasan lainnya tak memberlakukan jam malam yaitu, hingga kini Kabupaten Bogor masih berstatus zona kuning penularan Covid-19, tidak seperti Kota Bogor yang ditetapkan berstatus

zona merah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kampung Aman Covid-19 memiliki banyak fungsi. Seperti program ketahanan pangan dan menyaring orang-orang yang baru atau tidak dikenal masuk ke kampung atau desa tersebut. Ade Yasin menegaskan bahwa hingga kini Kabupaten Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) praadaptasi kebiasaan baru (AKB) hingga 10 November 2020. Segala aturan yang diterapkan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) No. 52 tentang PSBB pra-AKB.

#### **4.2.2.1. Dampak Bagi Dunia Usaha di Kecamatan Cibinong**

Covid-19 memberikan dampak dalam berbagai sektor yang ada di Kabupaten Bogor. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya wabah Covid-19 ternyata tidak hanya menyerang buruh-buruh pabrik saja yang dirumahkan atau para pengemudi ojek *online* yang kehilangan banyak penumpang, melainkan berdampak pula pada bagi dunia usaha usaha di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Cibinong. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku dunia usaha di Kecamatan Cibinong juga beragam dan berbeda satu sama lain. Baik bagi perusahaan besar maupun bagi UMKM yang terdampak Covid-19. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dampak bagi perusahaan ialah lebih menekankan kepada kesehatan dan keselamatan dari para pekerja. Seperti dilakukannya pengawasan berkala dan evaluasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan manajemen perusahaan dalam menjalankan protokol kesehatan. Sedangkan bagi UMKM, dampak yang dirasakan dari adanya Covid-19 ialah pendapatan atau *income* yang menjadi tidak menentu. Seperti terjadinya penurunan omzet setiap bulannya, atau pendapatan yang tidak lagi 100% seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Namun, tidak semua UMKM mengalami penurunan omzet. Ada pula UMKM yang justru mengalami peningkatan omzet setiap bulannya ketika terjadi pandemi hingga saat ini pada masa penerapan PSBB Pra-AKB.

1. Seblak Raja Seuhah: memulai usaha sejak tahun 2014 dengan alamat di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong. Sejak terjadi pandemi pendapatan tidak lagi terpenuhi 100% seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Mulai dari awal merebaknya Covid-19 pada bulan Maret lalu, penurunan pendapatan cukup tajam hingga angka 20% dari total penjualan. Pendapatan meningkat menjadi 30% dalam kurun waktu tiga bulan terakhir hingga pada bulan Oktober 202, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Pada saat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PSBB, penjualan mengalami penurunan yang drastis. Jangankan 50%, bahkan ada yang tak sampai 20%. Setelah beberapa kali dilaksanakan PSBB dan kemudian dilanjutkan dengan PSBB Pra-AKB, penjualan mulai mengalami sedikit peningkatan dari 20% menjadi 30%. Namun untuk mencapai 50% penjualan sangatlah susah jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya Covid-19.” (Wawancara dengan DDG, 9 Oktober 2020)

2. Dapur Mama Arya: memulai usaha sejak tahun 2019 dengan alamat di Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong. Ketika pandemic terjadi, usaha ini masih dalam tahap perintisan sebagai usaha yang baru memulai. Mulai dari awal merebaknya Covid-19 pada bulan Maret lalu, kemudian usaha ini memutuskan untuk menutup sementara usahanya dalam rangka melaksanakan imbauan pemerintah sebagai upaya pemutusan rantai persebaran Covid-19 selama satu bulan. Kemudian memulai kembali membuka usahanya, hingga dalam tiga bulan terakhir hingga bulan Oktober 2020 pendapatan meningkat melebihi biasanya meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, seperti pada kutipan berikut:

“Pada saat pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PSBB, produksi sempat dihentikan sementara kurang lebih selama satu bulan untuk menghindari persebaran COVID-19 yang semakin meluas, selama bulan Juni hingga Juli 2020. Pada bulan Juli 2020 kami sudah

membuka kembali produksi dengan melaksanakan protokol kesehatan agar tetap dapat menjaga keselamatan. Kemudian dampak yang kami rasakan selama terjadinya pandemi COVID-19 setelah kami membuka produksi kembali, produksi kami semakin meningkat dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Hal tersebut mungkin karena masih banyaknya pekerja yang melaksanakan WFH sehingga lebih banyak melakukan pembelian online.” (Wawancara dengan MRK pada tanggal 9 Oktober 2020)

#### **4.2.2.2. Dampak Bagi Masyarakat di Kecamatan Cibinong**

Masyarakat Kabupaten Bogor khususnya masyarakat di Kecamatan Cibinong merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak yang sangat dirasakan ialah oleh para keluarga pra sejahtera yang memiliki mata pencaharian harian seperti pedagang, ojek online, dan lain sebagainya. Dengan diberlakukannya PSBB pertama pada bulan April 2020, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi pendapatan dari masyarakat untuk bertahan hidup dengan kondisi pandemi yang memaksa mereka untuk dapat dan berusaha lebih keras meskipun kondisi pandemi sangat tidak menentu dan sangat berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan.

##### **1. Bagi mahasiswa**

Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini membuat mereka melaksanakan perkuliahan dengan metode daring atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online mengharuskan setiap mahasiswa memiliki jaringan internet yang stabil, sedangkan permasalahan tersebut dialami oleh banyak mahasiswa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dimana tidak semua wilayah di Indonesia memiliki jaringan yang stabil. Dengan jaringan internet yang tidak stabil membuat mahasiswa mengalami gangguan dalam menerima perkuliahan dan ilmu yang mereka dapatkan menjadi tidak terserap secara sempurna. Hal tersebut juga akan menjadi hambatan dan kendala ketika mereka sedang melaksanakan ujian secara online dimana kendala

kestabilan jaringan merupakan permasalahan dengan kemungkinan yang sangat besar.

Selain permasalahan terait dengan kestabilan jaringan, permasalahan yang cukup besar bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ialah terkait dengan kuota internet. Tidak semua rumah mahasiswa memiliki jaringan wifi, sehingga mereka harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk dapat mengikuti perkuliahan secara online atau daring. Jika biasanya mahasiswa hanya menggunakan internet untuk mengerjakan tugas, maka dengan metode pembelajaran jarak jauh maka mahasiswa harus menggunakan internet berbasis kuota untuk setiap aspek perkuliahan, mulai dari kegiatan perkuliahan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, hingga untuk pelaksanaan ujian. Pada awal mula masa pandemi, banyak mahasiswa yang mengeluhkan mengenai hal tersebut, namun seiring dengan berjalannya waktu, kampus-kampus mulai memberikan bantuan kepada mahasiswanya untuk menunjang proses perkuliahan dalam bentuk bantuan kuota dengan melaksanakan kerjasama dengan perusahaan *provider* ataupun bantuan dalam bentuk bantuan dana dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing kampus. Hal tersebut dirasa cukup membantu untuk mengurangi beban mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Dengan diberlakukannya perkuliahan jarak jauh, banyak kegiatan yang harus tertunda maupun harus dibatalkan, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Dampak yang dialami dengan terjadinya pandemi tentu saja dampak dalam pekerjaan dimana pekerjaan menjadi terhambat dengan kegiatan-kegiatan yang ditunda atau dibatalkan. Kemudian juga dampak pada kesehatan yang menjadi dirundung kekhawatiran dengan tidak dapatnya beraktifitas di luar rumah dan bersosialisasi.” (Wawancara dengan SCN, pada tanggal 1 Desember 2020)

Pelaksanaan perkuliahan dengan pembelajaran jarak jauh telah dilaksanakan sejak bulan April 2020 yaitu beberapa pekan setelah

diterapkannya PSBB tahap satu hingga saat ini. Setelah mahasiswa dirumahkan, mahasiswa dianjurkan untuk tetap menaati kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan kegiatan apapun di luar rumah, juga dengan tetap menjaga kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku untuk diterapkan di dalam rumah. Namun aturan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melaksanakan kegiatan apapun di luar rumah merupakan suatu kebijakan yang cukup bertentangan dengan kebiasaan atau budaya dari masyarakat Indonesia. Banyak faktor yang kemudian menjadikan masyarakat tidak mematuhi dan tidak mengindahkan aturan tersebut. Ada faktor masyarakat tidak mempercayai adanya Covid-19, ada faktor dimana masyarakat harus tetap mencari nafkah demi bertahan hidup di masa pandemi yang semakin sulit, ada pula yang mempercayai adanya Covid-19 namun merasa mulai terganggu mentalnya karena sudah bertahan di rumah terlalu lama, ada pula yang seolah bersikap acuh tak acuh terhadap adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat ialah meningkatnya potensi kriminalitas selama pandemi Covid-19. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi membuat potensi kriminalitas dipandang akan menjadi salah satu keresahan masyarakat dan akan mengancam keselamatan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga akibat daripada kesulitan ekonomi juga meningkat. Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong juga terlihat meningkat jika dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadi pandemi mungkin hanya segelintir orang yang terlihat mengantre dan juga tidak terlihat antrean yang terjadi setiap hari. Namun selama pandemi terlihat hampir setiap hari terjadi antrean yang cukup banyak di Pengadilan Agama Cibinong.

Begitu banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bogor selama masa pandemi Covid-19. Penanganan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 merupakan pekerjaan rumah tidak hanya bagi pemerintah Kabupaten Bogor, namun juga merupakan pekerjaan rumah

masyarakat Kabupaten Bogor agar dapat segera hidup terbebas dari kekhawatiran akan Covid-19 yang telah menimbulkan banyak korban jiwa bagi mereka yang memiliki imunitas lemah dan juga penyakit yang membuat Covid-19 mengacaukan pekerjaan imunitas tubuh. Meskipun tidak bisa lagi mendapatkan kehidupan normal layaknya sebelum terjadi pandemi karena adanya kebiasaan baru yang membuat kita senantiasa siaga untuk kemungkinan terburuk, paling tidak memiliki rasa bebas dari kekhawatiran namun tetap menjaga kebersihan juga merupakan investasi untuk keselamatan orang-orang terdekat juga lingkungan sekitar. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan masyarakat harus dilakukan secara baik agar dapat segera menurunkan angka penularan Covid-19 yang saat ini masih mengalami kenaikan dan penurunan yang terus terjadi setiap harinya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan terus menjaga kebersihan rumah dan kesehatan anggota keluarga agar tidak menjadi klaster baru Covid-19, juga dengan menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan sekitar seperti hidup bertetangga. Saling mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang harus dijalankan, tidak merasa lelah untuk terus mengikuti perkembangan kondisi terkini yang terkait dengan Covid-19. Apabila ada lingkungan terdekat yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 maka harus dibantu dengan kepedulian dan bukan dengan menjauhinya atau memandangnya sebagai penyebar penyakit. Karena kesehatan dan keselamatan mental sangat berpengaruh dan menjadi faktor penting dalam upaya mendapatkan kesembuhan dari Covid-19.

## 2. Pegawai Negeri Sipil

Ketika Covid-19 tersebar di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 dan menjadi berita yang dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan membuat negara-negara di dunia mulai melakukan pengawasan dan pemantauan terkait dengan riwayat perjalanan

masyarakatnya. Begitu juga dengan Indonesia, meskipun pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkesan lambat dan tidak sigap dan kurang bergerak cepat akan perkembangan kondisi yang terjadi. Hingga akhirnya Covid-19 dikonfirmasi oleh Presiden dan Menteri Kesehatan ditemukan di Indonesia yang kemudian berkembang dengan pesat dan masif. Pemerintah segera mengambil kebijakan untuk melaksanakan *social distancing* sebagai upaya dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Setelah terlaksana namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, dilanjutkan dengan penerapan PSBB oleh Pemerintah dengan harapan masyarakat tidak beraktifitas di luar rumah dan dapat tinggal di rumah selama dua pekan. Namun, kalangan masyarakat Kabupaten Bogor yang beragam, terutama Kecamatan Cibinong, membuat mobilisasi masyarakat tidak dapat diberhentikan, meskipun juga ada bagian masyarakat yang mematuhi dengan tinggal di rumah selama dua pekan pelaksanaan PSBB tahap satu. Kebijakan *social distancing* dan PSBB dibersamai dengan kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa dan bekerja dari rumah bagi para pekerja. Kebijakan SFH dimulai sebelum dilaksanakannya PSBB, sedangkan WFH dimulai setelah beberapa hari PSBB mulai dilaksanakan.

Dari kondisi yang terlihat setelah dilaksanakannya PSBB tahap satu, masyarakat masih terbagi menjadi dua bagian yang memercayai adanya Covid-19 dan yang tidak memercayai adanya Covid-19. Namun mereka yang tidak memercayai Covid-19 menyebarkannya kepada masyarakat lain sehingga timbul anggapan bahwa Covid-19 hanyalah rekayasa saja. Dengan adanya masyarakat yang bersikap acuh tak acuh, mereka dengan mudahnya tidak menaati aturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah, yang akan menimbulkan isu-isu dan penggiringan opini yang dapat menyebabkan penyebaran Covid-19 semakin masif dan tidak dapat dikendalikan, kemudian harapan untuk dapat segera memutuskan rantai penyebarannya akan semakin kecil peluangnya. Berbagai dalih yang dikemukakan oleh mereka yang tidak menaati peraturan tentunya juga menjadi permasalahan tersendiri

jika semakin banyak masyarakat yang mempertanyakan akan kebenaran dari pandemi Covid-19 dan hal itu akan semakin mengancam kesehatan, keselamatan, juga keamanan dari masyarakat. Kebutuhan hidup yang terus ada namun dengan kondisi pandemi yang tidak mendukung, ditambah dengan kondisi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan maka akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri di masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya kepanikan di masyarakat. Semakin masyarakat mengalami kepanikan, maka akan semakin banyak masyarakat yang dengan mudah terinfeksi oleh Covid-19 dengan minimnya kesadaran untuk menjaga kebersihan seperti anjuran 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Karena menjaga kebersihan dan kesehatan merupakan modal utama untuk menjaga diri, keluarga, serta lingkungan agar dapat terhindar ataupun dapat melawan Covid-19.

Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh para PNS tentu saja berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun tidak kehilangan pekerjaan, namun agenda-agenda yang telah dipersiapkan menjadi tertunda atau harus dibatalkan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, dengan kebutuhan yang bertambah dengan tinggal seluruh anggota keluarga di rumah. Banyak yang beranggapan bahwa PNS tidak merasakan dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19 karena tidak kehilangan pekerjaan dan memiliki pemasukan yang tetap untuk memenuhi kebutuhannya dan dianggap tentu dapat bertahan hidup meski dalam masa pandemi. Berbeda dengan mereka yang kehilangan pekerjaannya dan harus berusaha lebih lagi dalam mendapatkan pekerjaan di masa yang sulit saat ini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini sangat baik, meskipun banyak yang mengatakan penanganannya terlambat, namun Pemerintah sangat berusaha untuk menjaga keselamatan masyarakatnya dengan dibuatkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sejak awal terjadinya pandemi hingga saat ini. Memang bukan merupakan pekerjaan mudah untuk menjangkau seluruh bagian dari wilayah Kabupaten

Bogor yang sangat luas dan dengan jumlah masyarakatnya yang sangat banyak, sedangkan fasilitas yang tersedia sangatlah terbatas. Mulai dari rusah sakit sebagai tempat rujukan Covid-19, rumah sakit pusat isolasi, tenaga medis, tenaga-tenaga sukarelawan Covid-19, ketersediaan jumlah logistik, juga ketersediaan alat-alat penunjang seperti perlengkapan APD, masker, alat-alat tes untuk mengonfirmasi Covid-19 dengan *rapid* maupun *swab test*. Dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala bantuan yang dapat diterima, Pemerintah berusaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, sehingga diperlukan kerjasama dari masyarakat agar penanganan Covid-19 dapat berjalan sesuai dengan harapan dan pandemi dapat segera berakhir, seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama berusaha untuk meminimalisir permasalahan yang muncul akibat dari dampak yang terjadi. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerjasama dalam mencari solusi terbaik dari permasalahan yang telah timbul sebagai bentuk dari dampak atas adanya pandemi Covid-19. Adanya dampak-dampak negatif yang timbul karena masa pandemi Covid-19 membuat kita harus lebih berusaha dan menjadi pribadi yang lebih kreatif agar terus dapat menjadi produktif dengan kondisi yang terjadi yang membuat kita tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa sebelum terjadinya pandemi.” (Wawancara dengan E, pada tanggal 2 Desember 2020)

Meskipun tidak mudah untuk dapat bertahan hidup dan semakin sulit untuk bertahan hidup di masa pandemi, masyarakat harus terus berusaha dengan segala kreatifitas yang dimiliki untuk mendapatkan peluang atau membuka peluang. Namun dengan segala kepentingan pribadi yang diperlukan selama pandemi, hal tersebut jangan sampai membuat kita melupakan bahwa kita harus tetap memmberikan kepedulian dan saling mengingatkan kepada lingkungan terdekat, baik keluarga maupun lingkungan bertetangga. Jika terdapat lingkungan terdekat kita yang dinyatakan positif Covid-19, maka lingkungan terdekatnya harus saling bahu-membahu membantu untuk meringankan beban mental yang dialami.

Memberikan semangat dan penghiburan merupakan hal termudah yang dapat dilakukan meskipun hanya melalui sambungan telepon ataupun pesan singkat melalui telepon seluler. Jika dapat membantu memberikan bantuan berupa makanan dan lain sebagainya maka hal tersebut merupakan hal yang sangat patut untuk ditiru dan dilakukan di lingkungan masyarakat.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1. Strategi dan Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor**

Strategi dalam perumusan kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Strategi merupakan instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti pemerintah yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga pemerintahan yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Strategi dalam penelitian ini merupakan strategi yang diputuskan oleh Pemerintah Indonesia hingga Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19. Strategi merupakan praktik sosial, ia bukanlah even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, strategi dalam perumusan kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

Menurut Jones (dalam Elwan, dan Pramusinto, 2011), Implementasi strategi mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah. Proses implementasi bukan proses mekanis dimana setiap individu secara otomatis melakukan hal apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor

dimana sebagian masyarakat tidak menaati strategi yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Dalam penanganan wabah penyakit menular, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia bahwa wabah penyakit menular merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang menimbulkan dampak luar biasa terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga akan mengancam pertahanan negara. Selaras dengan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 03 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bahwa Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Komunikasi merupakan bagian yang paling penting dalam menghadapi ancaman pandemi yang terjadi. Kepercayaan publik harus dibangun dan dijaga dengan baik agar tidak terjadi kepanikan dan keresahan yang berlebihan dalam masyarakat dan agar penanganan pada masa pandemi dapat berjalan dengan lancar. Dalam menangani pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan arahan dan keputusan dari Presiden yang ditelahi diterapkan sejak masa awal ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional dalam hal ini ialah pandemi atau persebaran wabah penyakit dalam skala besar.

Menurut WHO (2007: 7) pandemi ialah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan beberapa negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Seperti yang

terjadi di Indonesia, lebih dari 30 provinsi yang terkonfirmasi memiliki kasus positif Covid, dan terjadi juga di Kabupaten Bogor, dimana lebih dari 30 kecamatan yang telah terkonfirmasi adanya kasus Covid-19 dari keseluruhan 40 kecamatan. Pandemi mengharuskan pentingnya memutus rantai transmisi dan melindungi populasi dari risiko. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pemutusan rantai penularan virus dilakukan dengan strategi berbasis komunitas dan strategi berbasis rumah sakit.

a. Strategi berbasis komunitas

Strategi berbasis komunitas merupakan strategi yang dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek, sehingga masyarakat dapat berperan aktif. Dalam strategi berbasis komunitas, yang menjadi poin utama ialah untuk menjaga masyarakat yang sehat agar tidak sakit dan menjaga masyarakat yang sakit agar dapat memutus rantai penularan Covid-19. Strategi ini merupakan aksi nyata yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk dapat menjaga masing-masing individu serta lingkungannya. Langkah nyata strategi berbasis komunitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ialah dengan melaksanakan swab test massal di berbagai titik di wilayah Kabupaten Bogor. Notifikasi penemuan kasus baru juga terus masuk hingga bulan Desember tahun 2020. Dengan adanya notifikasi penemuan kasus baru dan hasil dari swab test massal, dilakukan tracing untuk menemukan kontak erat yang selanjutnya kembali dilakukan swab test. Setelah mendapatkan hasil swab test, dilakukan treatment dengan isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit atau di pusat isolasi Covid-19 Kabupaten Bogor.

b. Strategi berbasis Rumah sakit

Strategi berbasis Rumah Sakit merupakan strategi yang dilakukan oleh Rumah Sakit terkait dengan terjadinya kondisi darurat atau terjadinya bencana. Strategi berbasis Rumah Sakit dapat dikatakan sebagai

kesiapsiagaan Rumah Sakit untuk menangani kondisi darurat atau ketika terjadi bencana. Seperti pada masa pandemi yang merupakan bencana non alam dalam bidang kesehatan, maka Rumah Sakit harus dapat menyiapkan perencanaan yang baik sehingga dapat menangani dan membantu masyarakat yang terpapar Covid-19. Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Bogor menjadi rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien Covid-19, ditambah dengan adanya Rumah Sakit Pusat Isolasi Covid-19 Kabupaten Bogor di Kecamatan Kemang juga ditambah dengan beberapa Rumah Sakit milik swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Rumah Sakit-Rumah Sakit Daerah yang menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Bogor menunjukkan kesiapsiagaan setiap Rumah Sakit Daerah sebagai garda terdepan untuk membantu masyarakat pasien Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karyono, Rohadin dan Indriyani (2020) diketahui bahwa penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Indramayu juga meliputi penerapan kebijakan social distancing dan PSBB yang dilanjutkan dengan PSBB Proporsional dan PSBB Pra-AKB. Dengan melaksanakan pola kehidupan baru (New Normal) sesuai protokol kesehatan Social Distancing atau Physical Distancing. Jaga Jarak, selalu memakai masker apabila beraktifitas di luar rumah, hindari keramaian atau kerumunan masa, selalu rajin mencuci tangan, waspada dan berhati - hati apabila kedatangan warga asing atau pendatang dari luar daerah, dan biasakanlah dengan pola hidup sehat dengan jaga kebersihan lingkungan dan rajin berolahraga. Begitupun dalam perihal Keamanan warga masyarakat dihimbau jangan sampai terlena di masa pandemi ini COVID-19, tingkat kriminalitas meningkat karena banyaknya pemutusan kerja ataupun lapangan kerja yang di tutup di masa pandemi, untuk itu kewaspadaan lebih di tingkatkan lagi. Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan kebijakan dan strategi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penelitian ini, mulai dari 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak); pelaksanaan *social distancing*;

PSBB; PSSB Proporsional; hingga PSBB Pra-AKB yang di dalamnya juga terdapat imbauan untuk menjaga keamanan diri dan lingkungan. Hal tersebut memiliki tujuan agar keamanan nasional tetap terjaga. Dimana konsep keamanan nasional merupakan konsep untuk menjaga keamanan dari setiap individu atau setiap warga negara.

#### a. Matriks Kebijakan Instansi

Tabel 4.2: Matriks Kebijakan Instansi

No.	Instansi	Kebijakan
1.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Tracing swab test</i></li> <li>b. <i>Treatment</i> isolasi mandiri dan rawat inap</li> </ul>
3.	Gugus Tugas COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan</li> <li>b. Penertiban pelaksanaan protokol kesehatan</li> <li>c. Penimbangan aturan yang akan diterapkan</li> <li>d. Monitoring dan evaluasi kebijakan</li> </ul>
3.	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembagian masker</li> <li>b. Penyemprotan disinfektan dan antiseptik</li> <li>c. Pengiriman air bersih ke pusat isolasi Covid-19</li> <li>d. Pembagian bantuan logistik Covid-19</li> </ul>
4.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian pelatihan kepada UMKM</li> <li>b. Pemberian bantuan kepada UMKM</li> <li>c. Pelaporan mingguan dari industri</li> <li>d. Monitoring dan evaluasi industri</li> </ul>

## **b. Hasil Kebijakan Instansi**

### 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Hasil yang didapatkan dengan pemberlakuan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk terus memantau dan melakukan tracing terkait dengan adanya potensi-potensi kasus baru Covid-19 di Kabupaten Bogor dan untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru Covid-19 di Kabupaten Bogor. Kemudian setelah dilaksanakan tracing dengan rapid dan swab test, dilaksanakan treatment dengan pelaksanaan isolasi mandiri di rumah masing-masing mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19, juga disediakan rumah sakit pusat isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang untuk mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun dinyatakan sebagai OTG. Selain itu juga terdapat rumah sakit rujukan Covid-19 diperuntukan bagi mereka yang dinyatakan positif Covid-19 dengan gejala. Tracing dan treatment yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bertujuan untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor, juga sebagai upaya untuk menurunkan angka persebaran Covid-19 yang telah terkonfirmasi agak tidak semakin meluas. Dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tersebut terlihat bahwa Kabupaten Bogor tidak termasuk ke dalam zona merah persebaran Covid-19 di Jawa Barat meskipun dari *tracing* dengan *swab test* yang dilakukan secara massal masih terdapat kasus-kasus positif yang ditemukan. Selain itu juga, dengan rutusnya swab test yang dilakukan secara massal dapat mencegah timbulnya klaster baru dalam penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor.

### 2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bupati Bogor terus mengupayakan peran aktif dalam menanggulangi bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor dan banyaknya jumlah penduduk

merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Gugus Tugas Covid-19 sebagai bagian dari Pemerintah yang difokuskan dalam menanggulangi Covid-19. Penegakkan protokol kesehatan terus dilakukan mengingat masih adanya masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak menganggap bahwa adanya Covid-19 adalah nyata. Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan guna mengurangi laju persebaran Covid-19 di Kecamatan-Kecamatan yang terkonfirmasi zona merah penyebaran Covid-19, maupun Kecamatan lain yang termasuk kepada zona kuning dan zona hijau. Penertiban protokol kesehatan juga harus terus dilaksanakan di berbagai Kecamatan, terutama di Kecamatan yang memiliki riwayat mayoritas masyarakatnya abai terhadap protokol kesehatan.

Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Pemerintah Indonesia, dan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor, rapat pembahasan yang dilakukan setiap minggu terus dilaksanakan terkait dengan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan dan terkait dengan kebijakan yang akan diberlakukan selanjutnya mengenai penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor dan bagaimana perkembangannya dengan laju kasus terkonfirmasi yang diketahui terus mengalami peningkatan dan penurunan yang belum stabil sehingga belum dapat diputuskan atau diperkirakan kapan Covid-19 di Kabupaten Bogor akan berakhir. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan merupakan upaya yang harus terus dilaksanakan secara tepat dan berkala agar dapat terus mengetahui perkembangan situasi terkini di masyarakat dan agar terus dapat menangani kasus Covid-19 secara terkendali. Dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19, dapat dikatakan bahwa sudah berjalan dengan cukup baik untuk mengendalikan laju persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor.

### 3) BPBD Kabupaten Bogor

Sebagai lembaga dalam bidang kebencanaan di Kabupaten Bogor, BPBD memiliki perencanaan kontijensi terkait dengan bencana yang mungkin akan terjadi di Kabupaten Bogor. Perencanaan awal terkait dengan pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bogor dan juga Dinas terkait lainnya yang memiliki kewenangan di dalam bidang kebencanaan. Perencanaan awal yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor merupakan upaya pencegahan atas bencana yang akan terjadi di Kabupaten Bogor dengan agenda yang telah dipersiapkan dan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Kemudian dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana non-alam berupa pandemi atau penyebaran wabah penyakit, maka anggaran kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD diubah alokasinya menjadi untuk penanganan Covid-19 yang digawangi oleh Dinas Kesehatan.

BPBD tetap melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu atau mendukung penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor dengan memberikan masker kepada masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan dan antiseptik, membantu mendistribusikan air bersih untuk rumah sakit pusat isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang, dan membantu mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bogor. Dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor, sangat membantu dalam mendukung penanggulangan bencana pandemi Covid-19 yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyokong kebutuhan masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 maupun masyarakat Kabupaten Bogor lainnya yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi yang belum berakhir.

### 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

Bidang perindustrian merupakan salah satu bidang yang terdampak secara langsung dari pandemi Covid-19, terutama pada sektor industri kecil

seperti UMKM. Jika pada masa normal sebelum terjadinya pandemi, Dinas Perindustrian memiliki anggaran untuk memberikan pelatihan dan lain sebagainya, pada masa pandemi anggaran-anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga mempengaruhi bagi sektor UMKM di Kabupaten Bogor, selain dari UMKM yang terdampak langsung dengan berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Berkurangnya minat masyarakat akan produk yang dijual dan difokuskan pada produk yang dapat mendukung kebutuhan sehari-hari dalam masa pandemi maupun kebutuhan untuk adaptasi kebiasaan baru dengan kondisi yang terjadi. Dinas perindustrian pun berusaha memfasilitasi UMKM yang mengalami permasalahan perekonomian dengan memberikan pelatihan atau arahan untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang akan menarik minat masyarakat dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti masker yang merupakan benda yang wajib dikenakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dimanapun berada. Permintaan-permintaan terkait masker di wilayah Kabupaten Bogor diserahkan kepada UMKM sebagai produsen yang kemudian akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masker di masyarakat Kabupaten Bogor.

Bagi industri besar seperti perusahaan yang telah memiliki manajemen yang baik dilakukan pemantauan dengan wajib lapor dari perusahaan kepada Dinas Perindustrian pada setiap minggunya sebagai bahan pengawasan dan evaluasi. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi sorotan yang sangat difokuskan oleh Dinas Perindustrian. Tetap adanya perusahaan yang tidak patuh merupakan tantangan tersendiri yang harus dapat diatasi agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan dengan ditemukannya kasus-kasus positif Covid-19 pada pekerjanya akan membuat perusahaan tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran hingga

penutupan sementara perusahaan hingga seluruh pekerja dinyatakan negatif dari Covid-19. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk mencegah timbulnya kluster baru Covid-19 di sektor industri di Kabupaten Bogor. Dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut, dapat mendukung penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bogor. Kebijakan-kebijakan harus terus dilakukan agar dapat terus mengendalikan persebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor agar tidak semakin meluas.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan arahan dari Bupati Bogor merupakan kebijakan untuk mendukung penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor. Meskipun dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan belum dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor, namun dengan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, menjaga agar Kabupaten Bogor tidak menjadi zona merah Covid-19 di Jawa Barat merupakan salah satu hal baik yang harus ditingkatkan agar dapat segera memutus rantai persebaran Covid-19.

Kebijakan yang sangat baik telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan tracing berupa swab test yang dilakukan secara massal dan secara berkala pada setiap minggu dengan target 10% dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor, meskipun yang tercapai hanya berkisar 5% dengan keterbatasan peralatan dan sumber daya sebagai tenaga pendukung pencapaian target tersebut. Meskipun BPBD sebagai lembaga kebencanaan di Kabupaten Bogor merupakan lembaga pendukung dalam penanganan Covid-19, BPBD tetap tidak tinggal diam dengan membantu mencegah persebaran Covid-19 dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami bahwa Covid-19 adalah nyata. Bantuan logistik yang didistribusikan oleh BPBD dengan bantuan Dinas terkait dan masyarakat serta perwakilan pejabat setempat bagi masyarakat di beberapa Kecamatan juga merupakan suatu upaya

yang sangat baik untuk menajag keberlangsungan hidup masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bogor yang mengalami kesulitan selama masa pandemi. Gugus Tugas Covid-19 terus melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memfokuskan diri pada penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor. Meski tidak banyak memiliki peran vital, namun kendali terkait dengan perkembangan kondisi Covid-19 di Kabupaten Bogor harus terus dipegang oleh Gugus Tugas Covid-19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melaksanakan perannya dengan baik dalam mengarahkan pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan roda perekonomian dengan memproduksi kebutuhan-kebutuhan yang sangat diminati dan dicari oleh masyarakat Kabupaten Bogor, juga agar masyarakat pelaku UMKM dapat terus bertahan hidup meski dalam keadaan sulit seperti masa pandemi Covid-19.

#### **4.3.2 Dampak Bencana Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor**

Dampak yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 berbeda-beda bagi kalangan masyarakat dan dalam berbagai aspek yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

##### **1) Aspek ekonomi**

Masyarakat mengeluhkan mengenai aspek ekonomi yang dirasa menjadi sangat sulit. Berbagai faktor dan kendala membuat masyarakat untuk berusaha lebih keras. Aspek ekonomi juga menjadi sorotan dari Pemerintah Indonesia, maupun Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat melindungi masyarakatnya meski dalam kondisi sulit seperti masa pandemi sekalipun. Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memperlihatkan perhatiannya kepada masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Silpa Hanoatubun (2020), dimana Hasil

analisis menyimpulkan bahwa, betul intervensi kuat untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah dibandingkan skenario minimal intervensi.

#### 2) Aspek kesehatan

Sebagai bencana non-alam berupa pandemi atau wabah penyakit, Covid-19 sangat meresahkan masyarakat dengan merebaknya di banyak Kecamatan di Kabupaten Bogor. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah ditreatment dengan rawat inap maupun dengan melaksanakan isolasi mandiri di rumah tetap tidak dengan seketika menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bogor. Terlebih pada bidang industri yang tidak dapat diberhenti diproduksi meskipun terjadi pandemi sebagai pemutar roda perekonomian.

#### 3) Aspek Sosial

Kehidupan sosial masyarakat sangat terpengaruh ketika terjadi pandemi. Kehidupan sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan interaksi dan hubungan sosial secara langsung atau tatap muka menjadi terkendala. Seperti yang terjadi pada pekerjaan, perkuliahan, juga kegiatan sekolah. Media dan tempat yang digunakan juga berubah. Dengan perubahan kondisi yang terjadi pada masa pandemi, masyarakat dituntut untuk menjadi adaptif dengan kebiasaan—kebiasaan baru yang harus dijalani bahkan pada masa pasca pandemi.

#### 4) Aspek keamanan

Keselamatan dan keamanan pada masa pandemi merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Penelitian terkait dengan kesiapsiagaan pada masa pandemi untuk mengantisipasi ancaman bioterorisme telah dilakukan oleh Ronny Basirun Simatupang (2017). Di dalam penelitian tersebut, pandemi yang dimaksud ialah pandemi influenza. Masa pandemi membuat masyarakat harus bertahan lebih kuat agar dapat terus menjalani kehidupan yang sangat berbeda dengan

sebelum terjadinya pandemi dan sudah tidak dapat dielakkan kembali. Keselamatan dan keamanan masyarakat juga merupakan tanggung jawab diri sendiri agar dapat menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan dengan baik dan dapat melewati masa pandemi hingga nanti masa pandemi Covid-19 dinyatakan terlampai atau berakhir. Menjaga keamanan masing-masing dari individu masyarakat merupakan upaya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang dimaksud ialah konsep yang digunakan dalam penyelenggaraan strategi nasional guna melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang dikatakan sebagai keamanan insani (*human security*) (Darmono, 2010)

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan dengan teori yang digunakan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

##### **5.1.1 Strategi dan Implementasi Covid-19 di Kab. Bogor**

Dalam upaya memutus mata rantai persebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan berbagai strategi untuk menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor telah dilakukan sebelum adanya pengumuman kasus 01 dan 02 dari Presiden dan Menteri Kesehatan pada awal bulan Maret 2020. Hal tersebut sejalan dengan adanya penemuan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) pertama di Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Februari 2020. Dengan ditemukannya PDP, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemantauan terkait dengan riwayat perjalanan. Kemudian setelah adanya penetapan Covid-19 sebagai pandemi dan ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor segera membentuk Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor yang diketuai oleh Bupati Bogor. Anggota Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor merupakan gabungan dari SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor fokus dalam upayanya untuk memerangi dan segera menanggulangi pandemi Covid-19.

Dimulai sejak adanya slogan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Lalu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB tahap satu dilaksanakan pada bulan April 2020 selama dua pekan, kemudian dievaluasi dan dinyatakan oleh Kepala Daerah Bodebek bahwa PSBB tidaklah efektif karena adanya beberapa faktor penghambat yang diantaranya ialah, mobilisasi masyarakat yang tidak dapat dikendalikan, kemudian kurangnya ketegasan peraturan dan masih adanya tumpang tindih peraturan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan dengan adanya masyarakat yang tidak memercayai bahwa Covid-19

nyata, sehingga menganggap bahwa Covid-19 hanya rekayasa. PSBB terus diperpanjang hingga menjadi PSBB Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru pada bulan Juni 2020 yang diterapkan hingga saat ini. Meski telah berulang kali menerapkan PSBB, hingga saat ini penemuan kasus terkonfirmasi juga semakin meningkat. Sejak awal ditetapkan sebagai pandemi, Pemerintah Kabupaten Bogor giat melakukan *tracing* untuk menemukan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19. Dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah masyarakat yang sangat banyak, tidak mudah bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera menanggulangi bencana pandemi Covid-19. Namun *tracing* terus dilakukan yang kemudian dilanjutkan dengan *treatment* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyiapkan rumah sakit pusat isolasi Covid-19 di Kecamatan Kemang, dan rumah sakit rujukan lainnya untuk pasien Covid-19 agar segera dapat tertangani.

Semakin banyak *tracing* yang dilakukan, maka semakin banyak pula kasus positif Covid-19 yang ditemukan. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari hal tersebut, namun *tracing* tetap terus dilaksanakan agar semakin cepat kasus-kasus baru ditemukan dan dapat semakin cepat juga untuk dilakukan *treatment* agar dapat menjadi kasus yang sembuh dan tidak menularkan kepada lingkungan terdekatnya dan angka penularan dapat segera diturunkan. *Tracing* tetap dilakukan meskipun tenaga pembantu untuk *tracer* dan *swaber* sangatlah terbatas. Dengan total penduduk enam juta jiwa, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki target untuk melaksanakan *swab test* sebanyak enam ribu per minggu, namun sampai saat ini hanya dapat dilakukan mencapai tiga ribu *swab test* per minggu.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan kegiatan pembagian masker dan penyemprotan disinfektan dan antiseptik sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dua kegiatan tersebut telah dilakukan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Selain melaksanakan dua kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor juga membantu mendistribusikan bantuan logistik bagi masyarakat Kabupaten Bogor di Kecamatan-Kecamatan yang membutuhkan. Bantuan bagi masyarakat Kabupaten Bogor datang dari banyak pihak, seperti dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, juga ada Bantuan Khusus. Bantuan yang diberikan berupa beras dan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### 5.1.2 Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor

Covid-19 merupakan wabah dan permasalahan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor. Dengan adanya pandemi yang terjadi hingga saat ini, sangat mengubah kehidupan sehari-hari menjadi penuh kekhawatiran dan kepanikan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor juga sangat beragam. Mulai dari mereka yang kehilangan anggota keluarganya karena merupakan korban jiwa dari Covid-19, mereka kehilangan pekerjaan karena terkena PHK dari kantor tempatnya bekerja, mereka yang kehilangan konsumennya karena dilarang untuk beraktivitas di luar rumah, bahkan mereka yang tidak dapat bersosialisasi seperti biasa meskipun hanya untuk bertegur sapa.

Dampak negatif yang terjadi selama masa pandemi sangat mengganggu masyarakat Kabupaten Bogor dengan segala permasalahan yang terjadi. Dampak dari kebijakan, strategi dan implementasi dalam penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kabupaten Bogor merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi yang dianggap akan memberikan dampak baik dalam pemutusan mata rantai dan penularan Covid-19. Serta hasil dari upaya masyarakat Kabupaten Bogor dalam menaati peraturan yang ada dan implementasinya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi aspek-aspek yang ada, seperti kesehatan, ekonomi, keselamatan, keamanan, dan lain sebagainya. Yang harus dipahami adalah bagaimana masyarakat dan dunia usaha di dalamnya dapat menjaga prioritas dalam kondisi pandemi seperti saat ini, yaitu kesehatan, keselamatan dan keamanan. Hal-hal tersebut menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup jangka panjang, ketika masa pandemi yang sulit dapat dilewati dan memasuki masa pemulihan pasca pandemi. Masa pemulihan saat ini memang belum dapat dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Bogor masih menaruh fokusnya pada grafik yang terus mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak konsisten, sehingga *tracing* terus dilakukan untuk mengurangi dampak yang semakin meluas oleh mereka yang menjadi *carrier*. Kasus-kasus yang tidak tertangani dengan baik akan semakin meluaskan dampak negatif di masyarakat. Demikian halnya bagi para pelaku dunia usaha, yang akan berimbas

pada kelangsungan usahanya yang tidak menutup kemungkinan terdampak meskipun secara tidak langsung, terlebih yang terdampak secara langsung.

Dunia usaha dan masyarakat merupakan penerima dampak secara langsung dari pandemi Covid-19. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mampu untuk memberhentikan sementara seluruh industri yang ada di wilayahnya karena hal tersebut akan memberhentikan sementara juga roda perekonomian di Kabupaten Bogor. Namun tetap diberlakukan peraturan yang tetap dapat mengendalikan mobilisasi dan operasionalnya dalam industri di Kabupaten Bogor dengan adanya pelaporan dan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Rekomendasi Teoretis**

- a. Diharapkan kepada Universitas Pertahanan untuk mengembangkan kajian di bidang manajemen bencana dan keamanan yang berhubungan dengan pandemi.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam terkait dengan Covid-19 dan materi di dalamnya yang dapat diimplementasikan sebagai upaya penanganannya.

### **5.2. Rekomendasi Praktis**

1. Bagi Pemerintah/Lembaga Kabupaten Bogor terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini sebagai masukan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menurunkan angka penularan dan kasus positif terkonfirmasi Covid-19. Beberapa rekomendasi kepada lembaga diantaranya adalah:
  - a. Harus diadakannya pendalaman kajian terkait dengan perencanaan terkait yang ada Lembaga Pemerintahan seperti SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, maupun NGO (*Non Government Organization*) atau *stakeholders*, juga organisasi terkait kebencanaan lainnya.
  - b. Membangun sinergitas yang baik antar lembaga berwenang dalam bidang kebencanaan.
  - c. Meningkatkan kemampuan dari sumber daya lokal dengan dilakukan sosialisasi dan pelatihan.

- d. Membangun kerjasama dengan media-media yang saat ini berkembang, baik media cetak maupun media elektronik sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.
  - e. Memanfaatkan sarana informasi dan komunikasi yang dapat terhubung langsung dengan masyarakat, seperti media sosial.
  - f. Memberikan perhatian yang sama pada keseluruhan wilayah Indonesia, seperti daerah-daerah perbatasan dan tidak hanya berfokus pada kota-kota besar.
2. Bagi Dunia Usaha di Kabupaten Bogor sebagai pemutar roda perekonomian yang menerima dampak secara langsung maupun tidak langsung dari masa pandemi ini diharapkan tetap dapat membuat peluang-peluang yang ada dengan melihat kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Dengan tetap membuka usaha, maka pelaku dunia usaha dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi. Namun setiap usaha yang dilakukan harus berbasis dengan protokol kesehatan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Bogor sebagai penerima dampak dari hilangnya pekerjaan, hilangnya anggota keluarga, dan terganggunya kehidupan sosial sehari-hari, diharapkan dapat selalu mematuhi kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai pengayom masyarakat akan melakukan setiap upaya untuk dapat melindungi keselamatan dan keamanan masyarakatnya. Dengan segala faktor penghambat dan kendala yang ada, harus tetap diusahakan untuk berbasis dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tingkatkan kesadaran bahwa pandemi Covid-19 adalah nyata dan berikan kepedulian kepada lingkungan terdekat. Jika di lingkungan terdekat ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka jangan dikucilkan, tetapi seharusnya dipedulikan, bahkan jika mampu seharusnya dibantu akan kebutuhannya karena mereka tidak mampu untuk melakukannya sendiri dengan tidak adanya kesempatan untuk keluar dari rumah selama pelaksanaan isolasi mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggoro, Kusnanto. (2005). *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Propatria Institute
- Azwar, Saifuddin. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Buzan, Barry. (1991). *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers
- Ching, Patricia, Kathleen Harriman, Yuguo Li, Carmem L Pessoa-Silva, Wing-Hong Seto, Teresa KF Wang. (2008). *Pedoman Interim WHO: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang Cenderung Menjadi Pandemi dan Pandemi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Trust Indonesia
- Diat, Lantip Prasajo. (2018). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UNY Press
- La Ode Muhammad Elwan, S., A. Pramusinto. (2011). *Implementasi Perda Kota Kendari No. 15 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nurjanah, et. al. (2011). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Nuryaman, Veronica Christina. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Selfare State) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia

## **Jurnal**

- Adityo Susilo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol 7, No 1*
- Bambang Darmono. (2010). Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XV (1)*
- Dana Riksa Buana. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol 7, No 3*
- Darmin Tuwu. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho Volume 3 Number 2, pp.267 -278*
- Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business Volume 4 Nomor 2 h. 384-388*
- Heri Kurniawansyah HS, Amrullah, M. Salahuddin, Muslim, Sri Nurhidayati. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari COVID-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1 No. 2: 130-139*
- Lili Fauzielly, Lia Journallah, Luthfan Harisan Jihadi, Muhammad Aditio, Taufiq Hadi Ramadhan, dan Iqbal Jabbari Mufti. (2018). Sosialisasi Mitigasi Bencana Longsor di Daerah Hambalang, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Vol. 7, No. 1*

- Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki. (2020). Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (Covid-19). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3*, pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083
- Ronny Basirun Simatupang. (2017). Kesiapsiagaan RSPAD Gatot Soebroto Dalam Penanggulangan Bencana Pandemi Influenza Untuk Mengantisipasi Ancaman Bioterrorisme. *Jurnal Majemen Bencana Vol 3, No 2*
- Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak COVID–19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, and Counselling Vol. 2 No. 1*

### Website

- Afdhalul Ikhsan. (2020). PSBB Ketiga Kabupaten Bogor, Kasus Positif dan Sembuh Covid-19 Bertambah 3 Orang  
<https://regional.kompas.com/read/2020/05/16/12240141/psbb-ketiga-kabupaten-bogor-kasus-positif-dan-sembruh-covid-19-bertambah-3> diakses pada tanggal 18 Mei 2020
- Anggi Tondi Martaon. (2020). Zona Merah di Kabupaten Bogor Bertambah Selama PSBB  
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2XmrdK-zona-merah-di-kabupaten-bogor-bertambah-selama-psbb> diakses pada tanggal 18 Mei 2020
- Anonim. (2020). Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19  
<https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490> diakses pada tanggal 25 Juni 2020
- Anonim. (2020). Strategi Tangkal Corona Berbasis Komunitas  
<https://sumeks.co/strategi-tangkal-corona-berbasis-komunitas/?page28332434234=3> diakses pada tanggal 1 Februari 2021
- Ardito Ramadhan. (2020). Bupati Bogor Keluhkan soal Pabrik yang Masih Beroperasi Selama PSBB  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/02/13205391/bupati-bogor-keluhkan-soal-pabrik-yang-masih-beroperasi-selama-psbb> diakses pada tanggal 18 Mei 2020

- BPBD Kabupaten Bogor  
<https://bpbd.bogorkab.go.id/bencana-dan-manajemen-bencana/>  
diakses pada tanggal 18 Mei 2020
- CNN Indonesia. (2020, Maret 14). Mengenal Social Distancing sebagai Cara Mencegah Corona  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara-mencegah-corona> diakses pada tanggal 19 Mei 2020
- D Hariyadi. (2020). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Gowa  
<https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-gowa> diakses pada tanggal 19 Mei 2020
- D Malik. (2020). Anies Tutup Lokasi Wisata di Jakarta, Wisatawan Pindah ke Puncak Bogor  
<https://www.vivanews.com/berita/nasional/40497-anies-tutup-lokasi-wisata-di-jakarta-wisatawan-pindah-ke-puncak-bogor?medium=autonext> diakses pada tanggal 19 Mei 2020
- Gischa, Serafica. (2020). Pandemi, Apa Itu?  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/18/150000269/pandemi-apa-itu?page=all> diakses pada tanggal 20 Juni 2020
- Gugus Tugas COVID-19. (2020). Percepatan Penanganan COVID-19  
<https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020
- N.R. Aida. (2020). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732> diakses pada tanggal 19 Mei 2020
- N.W. Koesmawardhani, (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020  
<https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020> diakses pada tanggal 19 Mei 2020
- Pemerintah Jawa Barat. (2020). Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19  
<https://pikobar.jabarprov.go.id/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2020). Informasi COVID-19 Kabupaten Bogor

<https://covid-19.bogorkab.go.id/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020

PPK – LIPI. (2015). Dampak Bencana Terhadap Kesehatan Masyarakat  
<http://kependudukan.lipi.go.id/en/population-study/public-health/222-dampak-bencana-terhadap-kesehatan-masyarakat>  
diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Portal Resmi Kabupaten Bogor. (2020). Bantu Warga Terdampak Covid-19 Pemkab Bogor Terima Bantuan 70 Ribu Paket Sembako dari Presiden RI

<https://bogorkab.go.id/post/detail/bantu-warga-terdampak-covid-19-pemkab-bogor-terima-bantuan-70-ribu-paket-sembako-dari-presiden-ri> diakses pada tanggal 24 Juni 2020

R. Sebayang, (2020). Awas! WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global. CNBC Indonesia

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200131060856-4-134146/awas-who-akhirnya-tetapkan-corona-darurat-global> diakses pada tanggal 19 Mei 2020

Rahardjo, Mudjia. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 19 April 2020

Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

<https://core.ac.uk/download/pdf/80816930.pdf> diakses pada tanggal 21 April 2020

RSUD Soekandar Kabupaten Mojokerto

<http://rsudsoekandar.mojokertokab.go.id/files/downloads/1591776803-7452.pdf> diakses pada tanggal 1 Februari 2021

Universitas Pertahanan

<https://www.idu.ac.id/fakultas/fakultas-keamanan-nasional> diakses pada tanggal 7 Mei 2020

Vento Saudale. (2020). Kasus Covid-19 di Bogor Meningkat 10%

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/626623-kasus-covid19-di-bogor-meningkat-10> pada tanggal 18 Mei 2020

World Health Organization. (2020). COVID-19 Situation Report-102

[https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200501-covid-19-sitrep.pdf?sfvrsn=742f4a18\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200501-covid-19-sitrep.pdf?sfvrsn=742f4a18_2) diakses pada tanggal 2 Mei 2020

World Health Organization. (2020). Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk Penjangkauan dan Kampanye, dalam Konteks Pandemi Covid-19  
[https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9_2) diakses pada tanggal 3 Februari 2021

### **Dokumen dan Perundang-Undangan**

Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/234/Kpts/Per-UU/2020 Tentang Kebijakan PSBB

Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/258/Kpts/Per-UU/2020 Tentang Perpanjangan PSBB

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Kemendes RI. 2006. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006- 2009. Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Kusnanto Anggoro. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2020 Tentang PSBB Proporsional

Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2020 Tentang PSBB Praadaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar


Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction 2009

Syamsul Maarif. (2019). Pengantar Manajemen Bencana. Bogor: Universitas Pertahanan

## LAMPIRAN 1

## SURAT IZIN PENELITIAN

  
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 04 /IX/2020  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar.  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 17 September 2020

Kepada  
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran  
di  
Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Kalender Akademik Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2019/2020.


2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Risma Suryani Purwanto NIM: 120190301025, nomor HP: 081218930022, alamat email: rismasuryan@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Penanggulangan Bencana Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor dalam Perspektif Keamanan Nasional".

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.

4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor  
Universitas Pertahanan  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

  
*Mal*  
Dr. J. J. D. D. S. IP., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR  
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan
3. Dekan FKN
4. Karo Aka Unhan.
5. Komandan Korem 061/SK

## LAMPIRAN 2

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN TEGAR BERIMAN, TELP. (021) 8754528 - 8754529, FAX. 8754526  
CIBINONG - 16914

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor  
 Dari : Asisten Administrasi  
 Nomor : Nota/TU  
 Tanggal : 10 Nopember 2020  
 Tembusan : Yth. Warek I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNHAN  
 Perihal : Pelaksanaan Penelitian

---

**ISI NOTA :**

Memperhatikan Surat Kepala Kantor KesbangPol Kabupaten Bogor Nomor : 070/1110 – Kesbangpol tanggal 23 September 2020 tentang Pelaksanaan Penelitian atas nama :

No	Nama	Jurusan
1.	Risma Suryani Purwanto	Jurusan Manajemen Bencana
2.	Nrangwesthi Widyaningrum	-Sda-

Dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menerima dan membantu hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Penelitian di Unit Kerja Saudara, yang akan dimulai pada tanggal 12 Nopember sampai dengan 20 Desember 2020.


Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.

**A.n SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Administrasi  
  
**Drs. YOUS SUDRAJAT, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198603 1011

Tembusan :  
Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

## LAMPIRAN 2

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong- Bogor  
Telp.(021) 87912518 Fax (021) 87912519 Web : dinkes.bogorkab.go.id

---

**SURAT IZIN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA**  
Nomor : 421 / 4136 - SDK

Dasar :

- Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48).
- Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bogor, Nomor : 070/1110-Kesbangpol tanggal 23 September 2020
- Surat Rektor Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Nasional , Nomor : B/04/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama	: Risma Suryani Purwanto
NPM	: 120190301025
Perguruan Tinggi	: Universitas Pertahanan Nasional
Jurusan/Prodi/Fak	: S2 Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional
Kegiatan	: Penelitian
Waktu	: 25 October 2020 sd 28 December 2020
Tempat	: Dinas Kesehatan,
Judul Penelitian	: Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Keamanan Nasional

dengan ketentuan :

- Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bogor.
- Tidak melaksanakan kegiatan diluar yang diizinkan
- Berkoordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan lokasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan
- Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan :
  - Selalu menggunakan masker dan APD lainnya sesuai keperluan
  - Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir atau dengan hand Sanitizer
  - Selalu menjaga jarak aman dengan orang lain
  - Selalu menghindari kerumunan
  - Tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan atau sulit menjaga jarak aman
  - Kegiatan dilaksanakan dengan protokol tanpa kontak langsung
- Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melalui email : sdmk.laporan@gmail.com

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Cibinong, 18 Oktober 2020

**Drs. MIKE KALBARINA, MARS**  
Petinggi Utama Muda  
NIP. 19640711 199103 2 009

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
- Yth. Wakil Bupati Bogor (sebagai laporan)
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
- Yth. Sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Bogor
- Yth. Rektor Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Nasional
- Yth. Kepala Bidang P2P

**LAMPIRAN 3****PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN**

Kategori Informan	Pemerintah/Dunia Usaha/Masyarakat
Nama	
Jenis Kelamin	
Tempat dan Tanggal Lahir	
Alamat	
Pekerjaan/Jabatan	
Kondisi Kesehatan	

**Pertanyaan Penelitian:**

Penelitian terdiri dari tiga bagian bagi Pemerintah; Dunia Usaha, dan Masyarakat. Pertanyaan penelitian meliputi kebijakan, strategi dan implementasi prabencana pandemi COVID-19, saat terjadi pandemi COVID-19, juga pascabencana pandemi COVID-19 serta dampaknya di Kabupaten Bogor.

## LAMPIRAN 3

### Daftar Pertanyaan Penelitian

#### A. Kepada Pemerintah dan Lembaga terkait lainnya

1. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran COVID-19 ke Kabupaten Bogor?
2. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan WFH dengan dalih mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?
4. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaannya dengan dalih adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

5. Bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?
6. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemulihan dari wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor?
7. Bagaimana kebijakan, strategi, dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor mengenai bantuan bagi masyarakat pra sejahtera dalam masa pandemi COVID-19?
8. Bagaimana potensi sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kab. Bogor?
9. Apa saja kebutuhan pasca bencana pandemi COVID-19 yang dikaji oleh pemerintah Kab. Bogor?
10. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Bogor?

#### B. Kepada Dunia Usaha

1. Bagaimana perusahaan melaksanakan kebijakan, strategi dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor pada tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) COVID19?
2. Bagaimana perusahaan melaksanakan kebijakan, strategi dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Bagaimana perusahaan menyikapi keluhan Bupati Bogor terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan WFH terkait adanya surat izin dari Kementerian Perindustrian?

4. Mengapa perusahaan tidak melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kab. Bogor sesuai dengan yang telah diberlakukan?
5. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari penyebaran COVID-19 meski tidak melaksanakan WFH?
6. Apa saja dampak yang dialami oleh perusahaan dari kebijakan, strategi dan implementasi yang diterapkan oleh pemerintah Kab. Bogor dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19?
7. Apa saja yang dilakukan pemerintah maupun perusahaan dalam menangani adanya dampak-dampak tersebut?

#### C. Kepada Masyarakat

1. Bagaimana masyarakat melaksanakan kebijakan, strategi dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor pada tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) COVID19?
2. Bagaimana masyarakat melaksanakan kebijakan, strategi dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?
3. Mengapa masyarakat tidak melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kab. Bogor sesuai dengan yang telah diberlakukan?
4. Apa saja dampak yang dialami oleh masyarakat dari kebijakan, strategi dan implementasi yang diterapkan oleh pemerintah Kab. Bogor dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19?
5. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menangani adanya dampak-dampak tersebut?

6. Bagaimana upaya masyarakat dalam mempertahankan penghidupan selama dalam kondisi pandemi akibat COVID-19?
7. Bagaimana upaya masyarakat dalam menjaga individu dan juga lingkungan untuk menghindari terinfeksi COVID-19?

**LAMPIRAN 4 DATA INFORMAN**

Kategori Informan	Pemerintah
Nama	Heri Hepriadi, S.Kom
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	40 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Pelaksana/Pengawas Industri
Kondisi Kesehatan	Sehat

Kategori Informan	Pemerintah
Nama	Adang Mulyana
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	48 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Kepala Seksi Surveilans dan Imunitas Dinas Kesehatan Kab. Bogor
Kondisi Kesehatan	Sehat

**LAMPIRAN DATA INFORMAN**

Kategori Informan	Pemerintah
Nama	Eliani
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	41 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Anggota Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor
Kondisi Kesehatan	Sehat

Kategori Informan	Pemerintah
Nama	Sri
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	47 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Anggota Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor
Kondisi Kesehatan	Sehat

**LAMPIRAN DATA INFORMAN**

Kategori Informan	Pemerintah
Nama	M. Adam Hamdani, S.T., M.P
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	- tahun
Pekerjaan/Jabatan	Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kab. Bogor
Kondisi Kesehatan	Sehat

Kategori Informan	Dunia Usaha
Nama	Dhemas Dwi Gantara
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	25 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Pemilik UMKM Seblak Raja Seuhah
Kondisi Kesehatan	Sehat

**LAMPIRAN DATA INFORMAN**

Kategori Informan	Dunia Usaha
Nama	Mahmudia Ratri Kirana
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	24 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Pemilik UMKM Dapur Mama Arya
Kondisi Kesehatan	Sehat

Kategori Informan	Masyarakat
Nama	Sawitri Chyian Nisari
Jenis Kelamin	Perempuan
Usia	22 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Mahasiswa
Kondisi Kesehatan	Sehat

**LAMPIRAN DATA INFORMAN**

Kategori Informan	Masyarakat
Nama	Enuh
Jenis Kelamin	Laki-laki
Usia	41 tahun
Pekerjaan/Jabatan	Pegawai Negeri Sipil
Kondisi Kesehatan	Sehat

## LAMPIRAN 5 TRANSKRIP WAWANCARA

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

1. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran COVID-19 ke Kabupaten Bogor?

Sudah dilakukan oleh BPBD, karena tupoksi sebagai bagian dari pemerintah. Ada rencana kegiatannya dan ada juga anggarannya. Tidak hanya BPBD, ada dinas lain yang punya tugas bersinggungan seperti Dinas Pemadam Kebakaran.

2. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?

Di Kabupaten Bogor membentuk satgas yang bekerja bersama perangkat daerah dan anggaran diubah dialokasikan untuk COVID-19 karena COVID-19 merupakan masalah bagi dunia dan harus dilawan bersama.

3. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan WFH dengan dalih mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Terkait dengan protokol kesehatan ada penertiban, satgas ada di setiap kecamatan dan desa. Pekerjaan yang bertingkat. Razia juga dilakukan, begitu juga dengan sosialisasi. Kalau ada yang tertangkap akan segera dihukum dan didenda. Sudah diberikan Surat Edaran untuk WFH, satgas dari kecamatan akan ke perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga.

4. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaannya dengan dalih adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Ada bantuan dan pengalihan anggaran. Ada bantuan sosial untuk masyarakat. 30 kg beras untuk setiap keluarga, untuk pendistribusian dibantu oleh polisi dan tentara. Bantuan sosial ada beberapa pos, seperti dari pusat, provinsi, kabupaten, dan ada bantuan khusus, terdapat sekitar lima sampai enam pintu.

5. Bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?

Sosialisasi terus dilakukan, aturan disesuaikan dengan kondisi saat ini sampai tanggal 27 November 2020. Selanjutnya memantau kondisi. Lihat kondisi Jabodetabek. Ada kebijakan untuk tempat wisata, juga ada pengendalian mobilisasi. *Rapid test* dilakukan di empat titik. Jika reaktif akan langsung diminta untuk pulang. Tempat wisata juga diarahkan untuk regulasi lain, kolam renang juga belum dibuka kecuali di hotel. Perhatian pada hal-hal tertentu tetap prioritas.

6. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemulihan dari wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor?

Aturan perpanjangan pertama PSBB, pernikahan diizinkan, dengan protokol kesehatan, kemudian juga harus lapor pada satgas, perusahaan buat latihan 50% kapasitas ruangan, maksimal 150 orang. *Tracking* peserta, *rapid test*, strategi pemulihan. Banyak bantuan yang untuk mereka yang terkena PHK, bantuan dari pusat juga ada. Bantuan untuk wisata seperti hotel, bayar pajak izin mendirikan bangunan, intinya pemerintah tidak menyulitkan masyarakat.

7. Bagaimana kebijakan, strategi, dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor mengenai bantuan bagi masyarakat pra sejahtera dalam masa pandemi COVID-19?

Bantuan bagi masyarakat ada tentunya, dan sudah diurus oleh instansi terkait.

8. Bagaimana potensi sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kab. Bogor?

Masker dibuat oleh Dinas UMKM, karena COVID-19 pemasukan berkurang, juga anggaran dialihkan, ada bantuan CSR, juga APBD. Tenaga kesehatan di puskesmas yang banyak tersebar di seluruh Kabupaten Bogor, cepat untuk melakukan *tracking tracing*. Pelaksanaannya berjenjang dari desa sampai ke Kabupaten. Ada rumah sakit pusat isolasi di Kemang, juga ada rumah sakit lapangan.

9. Apa saja kebutuhan pasca bencana pandemi COVID-19 yang dikaji oleh pemerintah Kab. Bogor?

Kebutuhan alat *rapid* oleh BIN. Banyak untuk *swab* juga, APBN dari pusat, Provinsi, CSR, swasembada dari PNS Kabupaten untuk Tenaga Kesehatan.

10. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Bogor?

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan dengan adanya bantuan dari Polisi Pamong Praja, Satgas di Kecamatan, Dinas Kesehatan, beserta dengan Dinas lain. Selalu ada rapat evaluasi di sekretariat Satgas. Evaluasi rutin dilakukan. Terutama untuk perpanjangan aturan, kemudian disesuaikan dengan aturan dan kondisi di Pemerintah Pusat.

### Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor

1. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran COVID-19 ke Kabupaten Bogor?

Sudah dilakukan oleh BPBD, karena tupoksi sebagai bagian dari pemerintah. Ada rencana kegiatannya dan ada juga anggarannya. Tidak hanya BPBD, ada dinas lain yang punya tugas bersinggungan seperti Dinas Pemadam Kebakaran.

2. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?

Di Kabupaten Bogor membentuk satgas yang bekerja bersama perangkat daerah dan anggaran diubah dialokasikan untuk COVID-19 karena COVID-19 merupakan masalah bagi dunia dan harus dilawan bersama.

3. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan WFH dengan dalih mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Terkait dengan protokol kesehatan ada penertiban, satgas ada di setiap kecamatan dan desa. Pekerjaan yang bertingkat. Razia juga

dilakukan, begitu juga dengan sosialisasi. Kalau ada yang tertangkap akan segera dihukum dan didenda. Sudah diberikan Surat Edaran untuk WFH, satgas dari kecamatan akan ke perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga.

4. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaannya dengan dalih adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Ada bantuan dan pengalihan anggaran. Ada bantuan sosial untuk masyarakat. 30 kg beras untuk setiap keluarga, untuk pendistribusian dibantu oleh polisi dan tentara. Bantuan sosial ada beberapa pos, seperti dari pusat, provinsi, kabupaten, dan ada bantuan khusus, terdapat sekitar lima sampai enam pintu.

5. Bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?

Sosialisasi terus dilakukan, aturan disesuaikan dengan kondisi saat ini sampai tanggal 27 November 2020. Selanjutnya memantau kondisi. Lihat kondisi Jabodetabek. Ada kebijakan untuk tempat wisata, juga ada pengendalian mobilisasi. Rapid test dilakukan di empat titik. Jika reaktif akan langsung diminta untuk pulang. Tempat wisata juga diarahkan untuk regulasi lain, kolam renang juga belum dibuka kecuali di hotel. Perhatian pada hal-hal tertentu tetap prioritas.

6. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemulihan dari wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor?

Aturan perpanjangan pertama PSBB, pernikahan diizinkan, dengan protokol kesehatan, kemudian juga harus lapor pada satgas, perusahaan buat latihan 50% kapasitas ruangan, maksimal 150 orang. Tracking peserta, rapid test, strategi pemulihan. Banyak bantuan yang untuk mereka yang terkena PHK, bantuan dari pusat juga ada. Bantuan untuk wisata seperti hotel, bayar pajak izin mendirikan bangunan, intinya pemerintah tidak menyulitkan masyarakat.

7. Bagaimana kebijakan, strategi, dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor mengenai bantuan bagi masyarakat pra sejahtera dalam masa pandemi COVID-19?

Bantuan bagi masyarakat ada tentunya, dan sudah diurus oleh instansi terkait.

8. Bagaimana potensi sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kab. Bogor?

Masker dibuat oleh Dinas UMKM, karena COVID-19 pemasukan berkurang, juga anggaran dialihkan, ada bantuan CSR, juga APBD. Tenaga kesehatan di puskesmas yang banyak tersebar di seluruh Kabupaten Bogor, cepat untuk melakukan tracking tracing. Pelaksanaannya berjenjang dari desa sampai ke Kabupaten. Ada rumah sakit pusat isolasi di Kemang, juga ada rumah sakit lapangan.

9. Apa saja kebutuhan pasca bencana pandemi COVID-19 yang dikaji oleh pemerintah Kab. Bogor?

Kebutuhan alat rapid oleh BIN. Banyak untuk swab juga, APBN dari pusat, Provinsi, CSR, swasembada dari PNS Kabupaten untuk Tenaga Kesehatan.

10. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Bogor?

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan dengan adanya bantuan dari Polisi Pamong Praja, Satgas di Kecamatan, Dinas Kesehatan, beserta dengan Dinas lain. Selalu ada rapat evaluasi di sekretariat Satgas. Evaluasi rutin dilakukan. Terutama untuk perpanjangan aturan, kemudian disesuaikan dengan aturan dan kondisi di Pemerintah Pusat.

### Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor

1. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran COVID-19 ke Kabupaten Bogor?

Kami sudah dapat memprediksi, tetapi kami tidak memiliki persiapan apa-apa karena kami juga menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan.

2. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?

Ketika Presiden mengumumkan hal tersebut, berdasar dengan arahan Pemerintah Daerah dengan peraturannya, BPBD segera terjun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di beebagai kecamatan di Kabupaten Bogor. Tidak lupa juga BPBD membagikan masker yang dilakukan sejak bulan April hingga bulan Oktober masih terus berlangsung dan telah terbagikan ratusan ribu masker untuk masyarakat.

3. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan WFH dengan dalih mengantongi izin dari

Kementerian Perindustrian, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Untuk perusahaan-perusahaan tersebut tetap kami ikut pantau juga meskipun kapasitas lebih banyak di Dinas Perindustrian. Promosi dan preventif terkait dengan arahan mengenai merebaknya COVID-19 juga tetap dilakukan agar mereka menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaannya dengan dalih adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Untuk masyarakat yang harus tetap bekerja untuk bertahan hidup tentu tidak akan dilarang, tetapi tetap harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Jika tidak, akan tetap didenda atau diberi sanksi lainnya.

5. Bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi COVID-19 dimana ada lapisan masyarakat yang tidak memercayai adanya COVID-19 disiasati dengan terus dipromosikannya COVID-19 dengan disiarkan melalui mobil BPBD menggunakan pengeras suara sepanjang jalan yang dilewati mobil tersebut ke kecamatan-

kecamatan di Kabupaten Bogor. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan tersebut.

6. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemulihan dari wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor?

Untuk rencana pemulihan kami rasa belum ada arahan ke sana, karena saat ini masih dalam tahap tanggap darurat, dan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan sejak bulan Maret masih tetap berlangsung hingga bulan Oktober 2020.

7. Bagaimana kebijakan, strategi, dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor mengenai bantuan bagi masyarakat pra sejahtera dalam masa pandemi COVID-19?

Yang kami tahu, untuk bantuan dari pemerintah tentu ada. Anggaran pun difokuskan untuk COVID-19, beberapa dinas mengalami pemangkasan termasuk juga dengan BPBD. Namun bagaimana distribusinya kami kurang mengetahuinya, karena kami dalam COVID-19 juga hanya diperbantukan sebagai pendukung.

8. Bagaimana potensi sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kab. Bogor?

Seluruh personel BPBD selalu siap sedia untuk terjun ke lapangan membantu usaha untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Namun dengan keterbatasan perlengkapan yang memadai seperti minimnya APD yang kami terima dan lain

sebagainya, tentu hal tersebut juga menjadi kendala tersendiri bagi kami.

9. Apa saja kebutuhan pasca bencana pandemi COVID-19 yang dikaji oleh pemerintah Kab. Bogor?

Sejauh ini belum ada arahan terkait dengan hal tersebut. Namun, BPBD akan tetap merencanakan kegiatan-kegiatan yang sepatutnya perlu dilakukan.

10. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Bogor?

Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan untuk mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan tersebut, juga apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus diperbaiki.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor

1. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam tahap pra bencana (mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini) yaitu sebelum masuknya persebaran COVID-19 ke Kabupaten Bogor?

Jadi memang sebelum adanya COVID-19 di Indonesia maupun di Kabupaten Bogor, kita juga sudah memprediksi ya. Memprediksi di China, kalau di China itu sendiri kan sudah kejadian ya pada akhir bulan Desember 2019 kan sudah mulai kalau di China itu makanya Kenapa namanya bukan COVID-20 kan makanya namanya COVID-19 yakan, kita juga sudah udah ada arahan ke sana ya, tetapi jangankan dari pihak daerah, pihak pemerintah pusat saja kan mohon maaf yakan sampai kecolongan hingga COVID-19 merebak di Indonesia. Apa yang ditanyakan kepada kami pihak dinas, ya mungkin kami belum bisa berbuat apa-apa sebelum COVID-19 itu masuk. Belum, belum ada yang bagaimana, belum ada persiapan, belum ada nanti kedepan harus berbuat apa. Karena memang pemerintah pusat sendiri kalau menurut kami ya, sepertinya memang kecolongan gitu.

2. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor sejak adanya pengumuman dari Presiden terkait dengan ditemukannya kasus 01 dan 02 pada awal bulan Maret 2020 lalu?

Saya yakin yang positif 01, 02 yang di Depok itu, itu pun bukan yg pertama. Bukan yang pertama itu sebenarnya. Yang paling pertama ketahuan yang ketahuan iya. Tapi yang pertama kali positif

saya yakin bukan yang orang depok itu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kita tetap ada yang namanya pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan yang termasuk tupoksi perindustrian ya, dalam hal ini kita bicaranya industri kecil kalau kita. Jadi ada pembinaan sertifikasi halal, pada pembinaan sertifikasi merk, ada pembinaan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan. Ada pembinaan yang namanya latihan pernapasan, seperti itu. Itu yang paling sering ada masalah mesin peralatan seperti itu.

Langkah-langkah yang kami lakukan sebelum adanya COVID, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Dengan adanya COVID di bulan maret ya kita melakukan PSBB kan awal maret ya? Nah pas kebetulan PSBB yang pertama itu, jadi gini semua semua dana kegiatan yang saya sebutkan ya buat kegiatan-kegiatan dinas, pertama kan kalau kita kan kalau kalau kita industri kecil, kalau kita kalau kita nilai perusahaan industri menengah mah kan kita nggak usah kasih udah nggak usah difasilitasi kan mampu berdiri sendiri kok. Untuk hal ini ya, manajemennya udah bagus dan lain lain lah. Nah semua dana itu dialihkan ke penanganan COVID. Dana-dana buat pembinaan itu mba. Ee diarahin ke penanganan COVID karena kan kita, pemerintah kan butuh biaya lumayan banyak ya. Bahkan ratusan milyar dan itu ya seluruh Kabupaten Bogor bisa diliat. Ke Bappeda juga nggak?

3. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya perusahaan dan pabrik-pabrik yang tidak melaksanakan WFH dengan dalih mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Perusahaan-perusahaan itu sendiri pasti ada perusahaan yang mematuhi kebijakan ada. Kalau bagus itu bagaimana penyikapannya dari kesehatan biasanya atau keputusan kesehatan kita lihat dulu aturannya kesehatan ya itu ya sama-sama sama mereka hal-hal yang tidak mereka laksanakan apapun mereka laksanakan dulu juga begitu kita ke sana kita ngasih surat apa namanya bawain ya pembawaan ya supaya misalnya mereka belum manfaati, manfaati kapasitas 50% misalnya di ruang kantor di ruang kerucut terus jaga jarak satu setengah meter nanti langsung pada saat itu juga pada saat kita akan tuh pada saat kita akan tuh tuh gitu lanjutnya selanjutnya.

Setiap perusahaan sudah makan nih mereka datang ke kami misalnya dari pas kita ke lapangan itu ada temuan tuh mereka tidak jaga Jarak ketiga tidak jaga jarak jaga jarak jarak dari pelaksanaannya kita kasih apa namanya dan dua hari tiga hari itu mereka udah kita laporan laporan terbaru jadi pokoknya dia mampir kantor lampirkan laporan mingguan ya mbak dapat izin operasional ya operasional dan izin operasional operasional kegiatan industri pakai mobilitas kegiatan itu kegiatan industri dia dapat dari Kementerian ESDM ya tetap menjalankan operasionalnya tnya keluhkan oleh oleh Bupati Bogor kota Bogor yang kayak gini atau sejenis sanksi atau bawa bahwa dari 8 sektor yang di dikecualikan itu nggak bisa

4. Dengan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, strategi dan implementasi yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor seperti masih adanya masyarakat yang tidak mematuhi pelaksanaannya dengan dalih adanya kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi kejadian tersebut?

Kalau kaitannya dengan aspek ekonomi, itu merupakan aspek di luar kesehatan. Pada bulan April hingga bulan Mei, dilakukan survei pada pasar besar di delapan titik di Kecamatan Cileungsi, Cibinong, Jonggol, Ciawi, Parung Panjang, Cigudeg, Jasinga, dan Cisarua dengan *swab test*. Ada pasar yang merupakan *cluster* dengan kasus positif. *Cluster* yang ditutup ialah pasar Cileungsi. *Swab test* pertama banyak ditemukan kasus positif. Setelah didapatkan hasil, segera dilakukan *tracing* kembali. Setelah dilakukan *swab test* kedua, hasilnya ditemukan lebih banyak lagi kasus positif. Dengan hasil tersebut, pasar Cileungsi ditutup, dilakukan penyemprotan dengan disinfektan, mereka yang terkonfirmasi positif diharuskan isolasi mandiri. Kemudian dilakukan *swab test* ketiga. Setelah dilakukan ketiga *swab test* dilaksanakan kebijakan untuk perkuat *tracing*, melakukan karantina, penyemprotan disinfektan, pasar ditutup, kemudian dibuka kembali dan begitu seterusnya.

5. Bagaimana pemerintah Kab. Bogor menyikapi masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan individu dan juga dengan adanya risiko wabah COVID-19?

Masyarakat diarahkan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang masih dapat dilakukan dalam bidang industri kecil.

6. Kebijakan, strategi dan implementasi apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pemulihan dari wabah COVID-19 di Kabupaten Bogor?

Perindustrian ada yang terdampak yang mengalami gangguan karena adanya ada ini kita Sebelum Idul Fitri juga nggak

ada yang makan akan tetapi mereka seperti mereka dia juga ya kan Kak kalau ini yang ini juga dengan cara kita bisa pemulihannya bagaimana pemulihannya Bagaimana pemulihan setelah adanya pandem ini dari tugas belajar atau akan langsung pegawainya dimasukkan 100%

7. Bagaimana kebijakan, strategi, dan implementasi dari pemerintah Kab. Bogor mengenai bantuan bagi masyarakat pra sejahtera dalam masa pandemi COVID-19?

Yang tadinya anggaran buat pelatihan industri-industri kecil itu, dialihkan ke penanganan COVID, buat apa? Ya itu kan terutama yang paling besar kan bansos ya, pertama buat bansos, yang kedua kan buat biaya perawatan di rumah sakit itu kan dibiayai sama pemda, seperti itu, nah itu tadi masalah anggaran ya. Nah jadi semua anggaran dialihkan ke penanganan COVID seperti itu. Nah, bagaimana kita dinas ya selaku perwakilan pemerintah di daerah begitu, taruhlah dinas perindustrian untuk menanggulangi itu semua. Yang pertama kalau untuk masalah modal bantuan keuangan kita nggak bisa mbak itu adanya di dinas ya, kalau kita peralatan-peralatan itu ada yang dari Kementerian ada yang dari APBD dan APBN kita ada ada.

8. Bagaimana potensi sumber daya lokal dalam penanggulangan bencana COVID-19 di Kab. Bogor?

Pada kita kan kita Peraturan Bupati ya jadi berarti kan nanti semua karyawan bisa masuk lagi kita melihatnya dari zona ya kalau misalnya tidak ada kasus ya kalau tidak dihapus ada hapus sekarang merah itu merah-merah kan seharusnya tuh di kantor kita. Kantor Bupati aja akan ke Kementerian Kesehatan tentang kesehatan,

seperti itu. Jadi kalau kita sebaiknya kita zonasinya merah menurut peraturan kan 75%. Zonasi sedang secara garis besar ini kalau ke Bogor menerapkan itu 70% dari sisa uangnya sudah reda kita bertahap kan yang di kantor bisa 75% masuk bisa sembarangan kebijakan. Ya kita harus nunggu dasar hukumnya. Kamu punya itu yang berpusat kebijakan dari pemerintah tidak ada arahan dari kepala daerah ya pegawai di kantor ini kan berkurang itu menjadi satu kendala tersendiri sejauh ini.

9. Apa saja kebutuhan pasca bencana pandemi COVID-19 yang dikaji oleh pemerintah Kab. Bogor?

Sejauh ini belum ada arahan terkait dengan hal tersebut. Namun, dalam bidang industri dari Perindustrian telah berusaha memfasilitasi masyarakat pengusaha industri kecil agar tetap dapat memutar roda perekonomiannya agar tidak mati.

10. Bagaimana monitoring dan evaluasi dari penanggulangan bencana pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Bogor?

Apakah ada yang kurang baik dari perusahaan atau bagaimana dalam pelaksanaannya itu perusahaan yang kira-kira dia kurang berkenan aja ya kalau kalau kena kan sudah emang emang sudah kewajiban kita sebagai ASN untuk mengawasi perdagangan kita dan industri kecil maupun yang besar dalam dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Nggak terima biasanya Nggak terima biasanya pemerintah tidak ada data diri data diri.

## LAMPIRAN 6

## DOKUMENTASI PENELITIAN

## 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor



## 2. Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor



### 3. BPBD Kabupaten Bogor



#### 4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor



**5. Mahasiswa**



## 6. Pegawai Negeri Sipil



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Risma Suryani Purwanto, lahir di Bogor pada 5 Juli 1996. Anak ke-1 dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Suharti. Menyelesaikan pendidikan SD Negeri Pajeleran 1 lulus tahun 2008, SMP Negeri 3 Cibinong lulus tahun 2011, SMA Negeri 3 Cibinong lulus tahun 2014, Sarjana (S-1) Universitas Negeri Jakarta Program Studi Ilmu Keolahragaan lulus tahun 2018, dan

pada tahun 2019 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan. Peneliti memiliki pengalaman sebagai atlet atletik pada tolak peluru sejak tahun 2008 dengan bergabung ke dalam Kelas Olahraga Jawa Barat hingga tahun 2011. Pada tahun 2010, peneliti beralih cabang olahraga menjadi cabang olahraga Kempo. Kemudian, mulai dari tahun 2011 Kelas Olahraga yang diikuti oleh peneliti dialihkan menjadi Kelas Olahraga Kabupaten Bogor, yang peneliti ikuti hingga tahun 2014. Pada masa perkuliahan S-1, peneliti tetap menjalankan rutinitasnya sebagai atlet dengan mengikuti berbagai kejuaraan dan pertandingan hingga pada peneliti mengikuti PORDA Jawa Barat XII 2014 yang mendapatkan medali perak dan PON Jawa Barat XIX 2016 yang mendapatkan medali perunggu.